



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas



Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan serta pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Bupati Banyumas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018, yaitu : **“TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”**.

LKjIP Kabupaten Banyumas Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam LKjIP ini tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras dari semua pihak terkait yakni aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini.

Purwokerto, Maret 2021
BUPATI BANYUMAS,

H. ACHMAD HUSEIN



PERNYATAAN REVIU



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharto No. 45B Purwokerto 53114
Telp. (0281) 630700 Faks. (0281) 643789 Email : inspektorat@banyumaskab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwokerto, 11 Maret 2020

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



[Handwritten Signature]
Herni Sulasti, SH, MH., CFA
Pembina Utama Muda
NIP. 196706101995032002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggungjawab serta untuk mewujudkan clean government dan good government. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan yang ditargetkan pada Tahun 2020, LKjIP ini juga sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Banyumas **“TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA.”**

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2020, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusi untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banyumas di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2020 dapat dikatakan **Sangat Tinggi** (134,10%). Hal ini, didasarkan pada



hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Banyumas 2020. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 19 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan :

1. 13 indikator (68,41%) tercapai dengan dikategorikan "Sangat Tinggi"
2. 2 Indikator Kinerja Utama (10,53%) tercapai dengan kategori "Tinggi"
3. 2 Indikator Kinerja Utama (10,53%) tercapai dengan kategori "Rendah"
4. 2 Indikator Kinerja Utama (10,53%) tercapai dengan kategori "Sangat rendah".

Dari 19 (Sembilan belas) indikator kinerja utama, 4 (empat) indikator kinerja utama dengan predikat rendah dan sangat rendah dipengaruhi oleh kondisi tahun 2020 dimana pandemi covid-19 memberikan pengaruh terhadap perekonomian , sektor tenaga kerja dan pariwisata karena banyak pemutusan hubungan kerja sehingga meningkatkan pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat juga. Sektor pariwisata juga mengalami dampak dengan menurun drastis kunjungan ke obyek-obyek wisata

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan 15 (lima belas) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP tahun 2020, telah dalam proses tindak lanjut, dan telah direncanakan tindak lanjut perbaikan pada tahun 2021.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera dan Berdaya Saing.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Pernyataan Telah Direviu	ii	
Ikhtisar Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vi	
Daftar Grafik	ix	
Daftar Gambar	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	1. Potensi Kabupaten Banyumas	1
	2. Struktur Organisasi	12
	3. Isu-isu strategis	12
	B. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	21
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
	A. Rencana Strategis	21
	B. Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2020	27
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	29
	D. Rencana Anggaran Tahun 2020	30
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	32
	A. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	32
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	34
	Tujuan 1	34
	Tujuan 2	40
	Tujuan 3	45
	Tujuan 4	59
	Tujuan 5	66
	Tujuan 6	69
	Tujuan 7	86
	Tujuan 8	93
	Tujuan 9	104
	C. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020	112
	D. Prestasi dan Penghargaan	125
BAB IV	PENUTUP	126
	A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	126
	B. Progres penyelesaian isu-isu strategis	127
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PNS berdasarkan golongan	4
Tabel 1.2	PNS berdasarkan jenjang pendidikan	4
Tabel 1.3	PNS berdasarkan jabatan	4
Tabel 1.4	Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas ADHB menurut pengeluaran tahun 2015-2019	8
Tabel 1.5	Inflasi <i>Year on Year</i> Purwokerto tahun 2015-2020	10
Tabel 1.6	Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020	11
Tabel 2.1	Skema misi, tujuan/sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020	29
Tabel 2.3	Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan tujuan tahun 2020	31
Tabel 3.1	Capaian indikator kinerja tahun 2020	32
Tabel 3.2	Predikat kinerja tahun 2020	34
Tabel 3.3	Capaian kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	35
Tabel 3.4	Rincian hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2019	35
Tabel 3.5	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	35
Tabel 3.6	Realisasi anggaran program	36
Tabel 3.7	Capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	40
Tabel 3.8	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	40
Tabel 3.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020	42
Tabel 3.10	Realisasi anggaran program	43
Tabel 3.11	Capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang berkeadilan	46
Tabel 3.12	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	46
Tabel 3.13	Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2020	46
Tabel 3.14	Garis kemiskinan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020	48
Tabel 3.15	Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan tahun 2015-2020	49
Tabel 3.16	Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019	56
Tabel 3.17	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (juta Rp/tahun) Tahun 2017-2019	56
Tabel 3.18	Realisasi anggaran program	57



Tabel 3.19	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian	59
Tabel 3.20	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	59
Tabel 3.21	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas	60
Tabel 3.22	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha di Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2014 – 2019	61
Tabel 3.23	Realisasi anggaran program	64
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis	66
Tabel 3.25	Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	66
Tabel 3.26	<i>Cut Off Point</i> Indeks Ketahanan Pangan	67
Tabel 3.27	Realisasi anggaran program	68
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja	70
Tabel 3.29	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	70
Tabel 3.30	Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Banyumas tahun 2015-2020	71
Tabel 3.31	Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan sektor triwulan I-IV tahun 2020	72
Tabel 3.32	Nilai dan status Indeks Kualitas Air (IKA)	76
Tabel 3.33	Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020	76
Tabel 3.34	Hasil pengukuran Luas Tutupan Hutan (LTH)	81
Tabel 3.35	Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas tahun 2020	82
Tabel 3.36	Realisasi anggaran program	84
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	86
Tabel 3.39	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	86
Tabel 3.40	Kondisi jalan Kabupaten Banyumas tahun 2020	87
Tabel 3.41	Capaian kinerja panjang jalan dalam keadaan mantap dari tahun 2016-2020	87
Tabel 3.42	Perkembangan Kinerja Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih Tahun 2015 – 2020	89
Tabel 3.43	Fasilitasi terminal di Kabupaten Banyumas	90
Tabel 3.44	Realisasi anggaran program	90
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	93
Tabel 3.46	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	94



Tabel 3.47	Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Banyumas tahun 2015-2020	97
Tabel 3.48	Data industri kreatif di Kabupaten Banyumas	98
Tabel 3.49	Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 - 2019	101
Tabel 3.50	Realisasi anggaran program	103
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat	104
Tabel 3.52	Capaian kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023	104
Tabel 3.53	Angka konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2020	105
Tabel 3.54	Capaian kinerja pelestarian budaya Banyumas dari tahun 2015-2020	109
Tabel 3.55	Realisasi anggaran program	111
Tabel 3.56	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Sebelum Audit BPK RI)	112
Tabel 3.57	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2020	113
Tabel 3.58	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020	114
Tabel 3.59	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya	116
Tabel 3.60	Komposisi refocusing dalam rangka Covid-19 tahun 2020	123



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas atas dasar Harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 (dalam milyar rupiah)	6
Grafik 1.2	Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2015-2019(%)	7
Grafik 1.3	Perbandingan Target dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 (%)	7
Grafik 1.4	Grafik angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tahun 2019	8
Grafik 1.5	Inflasi pada 6 (enam) kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	10
Grafik 1.6	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyumas Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2015-2020	12
Grafik 3.1	Capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020	34
Grafik 3.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2016 s.d 2020	43
Grafik 3.3	persentase penduduk miskin	47
Grafik 3.4	Garis kemiskinan tahun 2015 sampai dengan 2020 (Rp/kapita/bulan)	48
Grafik 3.5	Garis kemiskinan tahun 2015 sampai dengan 2020	49
Grafik 3.6	Perbandingan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2015 sampai tahun 2020	50
Grafik 3.7	Indeks Gini Kabupaten Banyumas tahun 2015-2020	52
Grafik 3.8	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020	54
Grafik 3.9	Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyumas tahun 2014-2019	62
Grafik 3.10	Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019	68
Grafik 3.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banyumas dan kabupaten tetangga tahun 2017-2020	101
Grafik 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 - 2020	102
Grafik 3.13	Jumlah Kasus Kriminalitas di Kabupaten Banyumas Tahun 2015– 2020	106
Grafik 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020	126



Grafik 4.2	Kualitas Sumber Daya manusia tujuan ke-2	128
Grafik 4.3	Kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan ke-3	129
Grafik 4.4.	Ketersediaan infrastruktur	129
Grafik 4.5	Pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	130
Grafik 4.6	Kemiskinan dan Pengangguran	131
Grafik 4.7	Pertanian mendukung kedaulatan pangan	132
Grafik 4.8	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	133
Grafik 4.9	Tata kelola pemerintahan	133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Banyumas	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas	13
Gambar 1.3	Bupati Banyumas memimpin rapat koordinasi tingkat Muspida	13
Gambar 1.4	Pengaspalan jalan	14
Gambar 1.5	Pasar Manis	15
Gambar 1.6	Rapat koordinasi pengentasan kemiskinan	16
Gambar 1.7	Pengembangan bibit durian Bromo	17
Gambar 1.8	Peningkatan produksi padi di Kabupaten Banyumas	17
Gambar 1.9	Bupati Banyumas meninjau pengelolaan sampah dengan pemberdayaan magot	18
Gambar 1.10	Bupati Banyumas memimpin rapat koordinasi di tingkat perangkat daerah	19
Gambar 1.11	Sistem informasi yang dibuat dalam mendukung pengelolaan kinerja	20
Gambar 3.1.	Penerimaan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019	40
Gambar 3.2	Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	50
Gambar 3.3	Rehabilitasi pasar tradisional	51
Gambar 3.4	Mall Pelayanan Publik	53
Gambar 3.5	Tugu Gada Rujakpolo Jenderal Soedirman	53
Gambar 3.6	Bupati Banyumas dalam acara pelatihan kewirausahaan bidang ketahanan pangan Kabupaten Banyumas	63
Gambar 3.7	Panen melon di Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang	63
Gambar 3.8	Program <i>safety belt</i> untuk penderes di Kabupaten Banyumas	64
Gambar 3.9	Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas	71
Gambar 3.10	Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas	74
Gambar 3.11	Bupati Banyumas melakukan pengecekan pabrik garmen di Kalibagor	74
Gambar 3.12	Pengambilan sample air untuk uji kualitas air	78
Gambar 3.13	Pemasangan <i>passive sampler</i>	79
Gambar 3.14	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Jalan Tugu - Pasar Bangsa, Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen	88



Gambar 3.15	Wakil Bupati Banyumas meresmikan program RTLH di Desa Randegan Kecamatan Wangon	89
Gambar 3.16	Terminal Bulu Pitu Purwokerto	90
Gambar 3.17	Bupati Banyumas Achmad Husein melakukan uji coba pengaspalan hotmix berbahan baku campuran plastik kresek di Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas	93
Gambar 3.18	Wisata off road kawasan kaki Gunung Slamet Baturraden	96
Gambar 3.19	wisata curug di Banyumas (Curug Nangga dan Curug Jenggala)	96
Gambar 3.20	Wakil Bupati Banyumas membuka pameran UMKM di Pendopo Wakil Bupati Banyumas	100
Gambar 3.21	Kalender evant festival dan budaya tahun 2020	110
Gambar 3.22	Festival budaya Kabupaten Banyumas 2020	111
Gambar 3.23	Pelaksanaan rapat dalam masa pandemi Covid-10	122
Gambar 3.24	Pembagian masker kepada masyarakat oleh Bupati Banyumas	124
Gambar 3.25	Penyemprotan desinfektan di jalan-jalan protokol	124



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan SAKIP berdasarkan pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020.
3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2020 tersebut, akan disajikan dalam buku ini yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. POTENSI KABUPATEN BANYUMAS

a. Letak Wilayah Geografis

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak diantara 108°39'17"-109°27'15" BT dan 7°15'05" - 7°37'10" LS.



70.122 Ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 30,721 Ha lahan bukan pertanian.

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25-100 mdpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 mdpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.

Kabupaten Banyumas terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan selatan. Lokasi strategis Kabupaten Banyumas telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, dan menjadikan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Banyumas tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Purwokerto meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta perputaran uang. Namun di sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Purwokerto berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

Dataran rendah di wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahunan dan tanaman perkebunan.

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.

d. SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Jumlah PNS Pemerintah



Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1 PNS berdasarkan golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	271	21	292	2,47
Golongan II	1.169	830	1.999	16,93
Golongan III	2.176	3.747	5.923	50,16
Golongan IV	1.671	1.924	3.595	30,44
Jumlah	5.287	6.522	11.809	100

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.2 PNS berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Pendidikan Dasar	196	7	203	1,72
SLTP Umum	315	28	343	2,90
SLTP Kejuruan	14	1	15	0,13
SLTA Umum	667	225	892	7,55
SLTA Kejuruan	396	227	623	5,28
Diploma I	11	13	24	0,20
Diploma II	69	46	115	0,97
D-II + A-II	1	0	1	0,01
Sarjana Muda	3	2	5	0,04
BAKLOREAT / AKADEMI	11	13	24	0,20
Diploma III	292	996	1.288	10,92
Diploma IV	47	132	179	1,52
Sarjana	2.885	4.579	7.464	63,21
S-1 + AIV	41	73	114	0,97
Profesi	1	8	9	0,08
Pasca Sarjana	292	152	444	3,76
Spesialis I	42	19	61	0,52
Spesialis II	1	0	1	0,01
Doktor	3	1	4	0,01
Jumlah	5.287	6.522	11.809	100

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2020

Sedangkan jumlah PNS di Kabupaten Banyumas berdasarkan jabatannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.3 PNS berdasarkan jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Pimpinan tinggi pratama	25	4	29	0,25



Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Administrator	148	45	193	1,63
Pengawas	447	308	755	6,39
Fungsional tertentu	2.769	4.819	7.588	64,26
Fungsional umum	1.898	1.346	3.244	27,47
Jumlah	5.287	6.522	11.809	100

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas , 2020

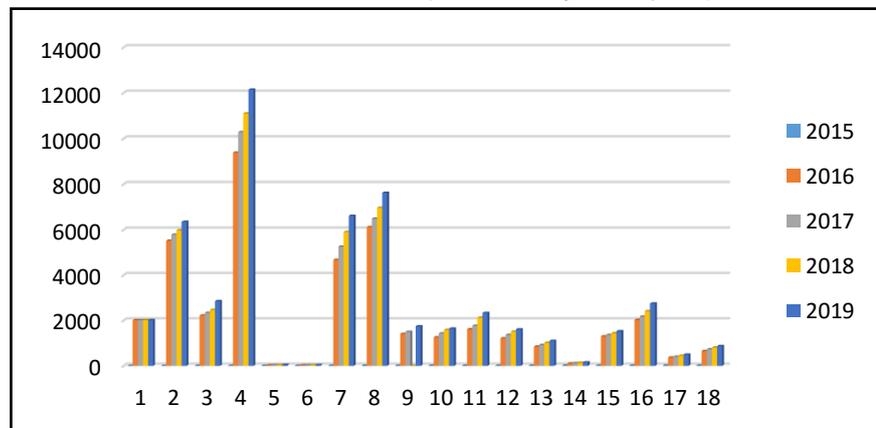
Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka komposisi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bervariasi, yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan bekerja yang sama .

e. Kondisi Perekonomian

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 Tahun 2020 telah mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas. Meskipun belum tersedia data publikasi resmi, PDRB Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dengan melambatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nilai PDRB pada Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

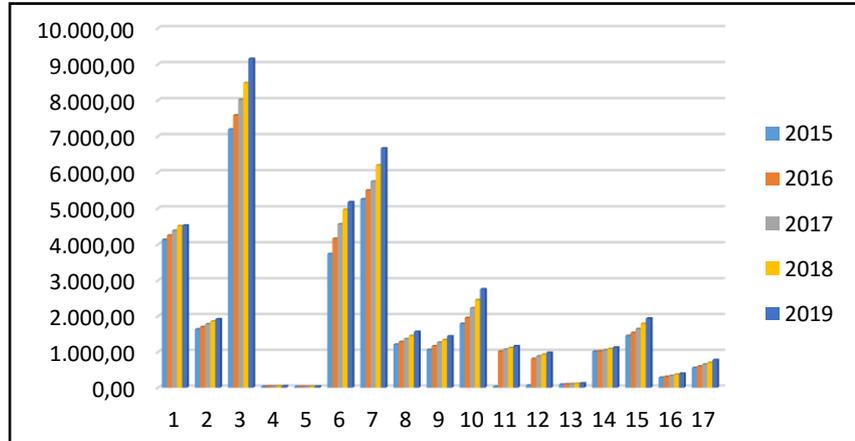
Grafik . 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kab. Banyumas, 2019



Grafik. 1.2
 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
 Tahun 2015-2019 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kab. Banyumas , 2019

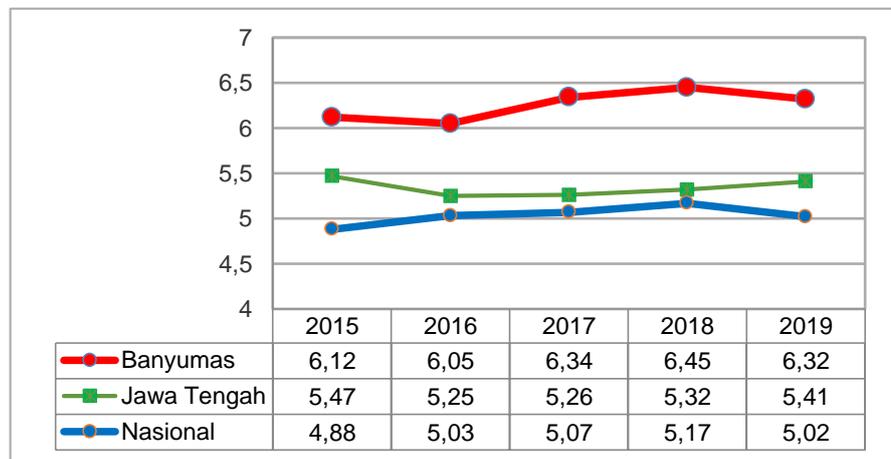
Keterangan tabel :	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2	Pertambangan dan Pengalihan
3	Industri Pengolahan
4	Pengadaan Listrik dan Gas
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6	Konstruksi
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor jasa keuangan dan asuransi
8	Transportasi dan pergudangan
9	Penyediaan akomodasi dan makan
10	Informasi dan komunikasi
11	Jasa keuangan dan asuransi
12	Real estat
13-14	Jasa perusahaan
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib
15	Jasa pendidikan
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17	Jasa lainnya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas dilihat dari kontribusinya, selama tiga tahun terakhir kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Di Kabupaten Banyumas sektor industri pengolahan sudah menjadi sektor andalan dalam pembentukan PDRB dimana pada tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian adalah merupakan sektor andalan. Sektor yang dalam



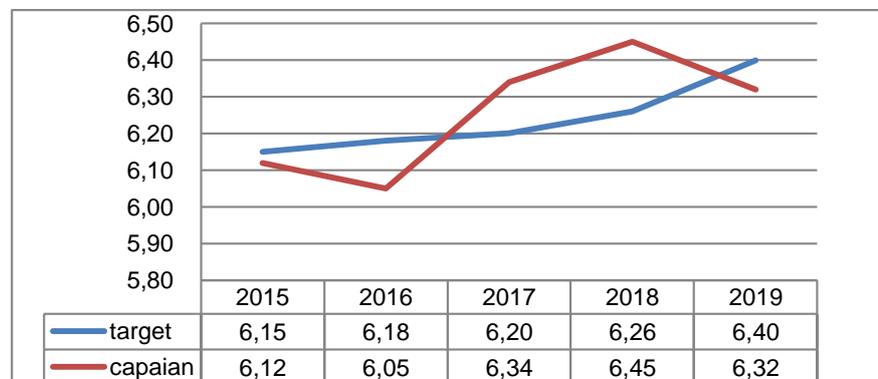
tiga tahun terakhir kontribusinya cenderung selalu naik adalah sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2015 s.d 2019 berfluktuasi dan cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2015-2019

Gambar 1.3
Perbandingan Target dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2019



Ditinjau dari aspek pengeluaran, PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2019 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yakni sebesar 66,72%, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya sebesar 38,57%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan penurunan selama kurun waktu lima tahun dari sebesar 71,63% pada tahun 2015. Secara rinci data kontribusi PDRB Kabupaten Banyumas menurut pengeluaran selama kurun waktu lima tahun yakni mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.48
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2015–2019

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (%)	71,63	70,48	69,44	67,66	66,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	1,15	1,15	1,15	1,16	1,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	9,77	9,51	9,26	8,90	8,49
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	37,77	38,19	38,17	38,44	38,57
5	Perubahan Inventori (%)	0,85	0,37	0,35	0,37	0,33
6	Net Ekspor	-21,17	-19,70	-18,15	-16,51	-15,32
	PDRB Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019

Besarnya pendapatan rata-rata penduduk atau PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Namun demikian pendapatan perkapita yang tinggi belum menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2) Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional (Sakernas) Tahun 2019, Penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 1.294.412 jiwa. Dari jumlah tersebut 868.553 (67,1%) merupakan penduduk angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, pengangguran maupun yang sedang mencari pekerjaan), dimana 533.042 adalah laki-laki dan 335.511 adalah perempuan.



sedangkan penduduk bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebesar 425.859 (32,9) dengan komposisi laki-laki sebanyak 107.181 sedangkan sisanya 318.678 adalah perempuan. Sebagai dampak pandemi Covid-19, di Kabupaten Banyumas terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 324 orang, dirumahkan sebanyak 2.388 orang dan jumlah pengangguran sebanyak 45.683 orang

Grafik 1.4 Grafik angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Tahun 2019



Sumber: BPS Kab. Banyumas, 2020

Untuk melihat besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah adalah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK Kabupaten Banyumas tahun 2019 menunjukkan angka 67,10% yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk penduduk yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

3) Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya



likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Apabila dilihat dari perbandingan inflasi tahunan secara umum, menurut penghitungan inflasi tahun kalender 2020 (Januari – Desember) adalah terjadi inflasi sebesar 1,90%. Berikut tabel perbandingan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (year on year) tahun 2015-2020:

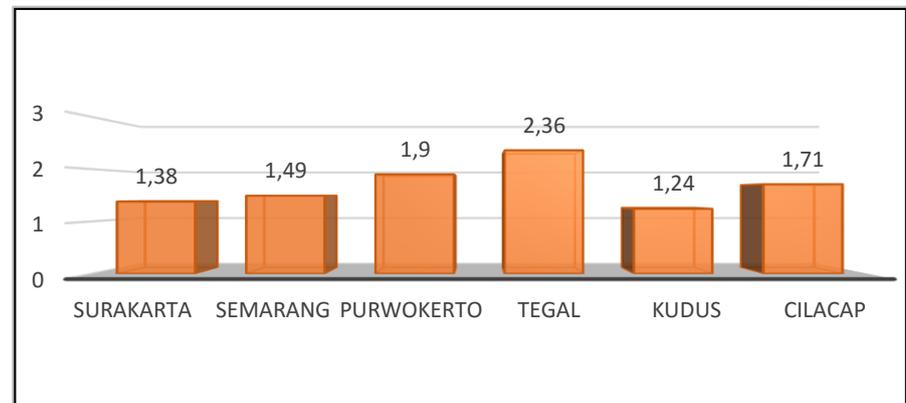
Tabel 1.5
Inflasi Year on Year, Purwokerto Tahun 2015-2020

Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Desember terhadap Desember (YoY)	2,52	2,42	3,91	2,98	2,28	1,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2020

Pada Desember 2020, dari 6 kota di Provinsi Jawa Tengah yang diamati perkembangan inflasinya, dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Grafik 1.5 Inflasi pada 6 (enam) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dari enam kota inflasi di Jawa Tengah, inflasi Banyumas menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kota Tegal. Walaupun inflasi di kota Purwokerto sebesar 1,90, masih terkendali dan berada dibawah rentang sasaran inflasi 2020 sebesar 3%±1% (yoy). Faktor-faktor penyebab Inflasi antara lain : ketersediaan pasokan barang kebutuhan, kebijakan pemerintah misal kenaikan tarif listrik, PDAM, kenaikan ongkos produksi barang dsb.

4) Bidang Keuangan Daerah



Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2020 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.568.568.763.744	3.340.277.876.851
1.1	Pendapatan Asli Daerah	729.892.819.015	633.302.968.814
1.2	Dana Perimbangan	2.046.987.459.669	1.875.995.975.977
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	791.688.485.060	830.978.932.060
2.	Belanja Daerah	3.743.918.763.744	3.556.833.000.332
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.209.349.806.320	2.152.818.084.688
2.2	Belanja Langsung	1.534.568.957.424	1.404.014.915.644
3.	Pembiayaan Daerah	175.350.000.000	216.555.123.481
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	205.000.000.000	247.705.123.481
3.1.1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	200.000.000.000	242.705.123.481
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.650.000.000	31.150.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	28.150.000.000	28.150.000.000
3.2.2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000	3.000.000.000
3.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0	0
3.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas, 2020

f. Sosial Budaya.

1) Penduduk.

Berdasarkan data dari Dindukcapil Kabupaten Banyumas, penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2020 berjumlah 1.873.196 orang, terdiri dari 945.119 (50,45%) orang laki-laki dan 928.077 (49,55%) orang perempuan. Dari jumlah penduduknya, terlihat 3 (tiga) kecamatan yang merupakan urutan teratas jumlah



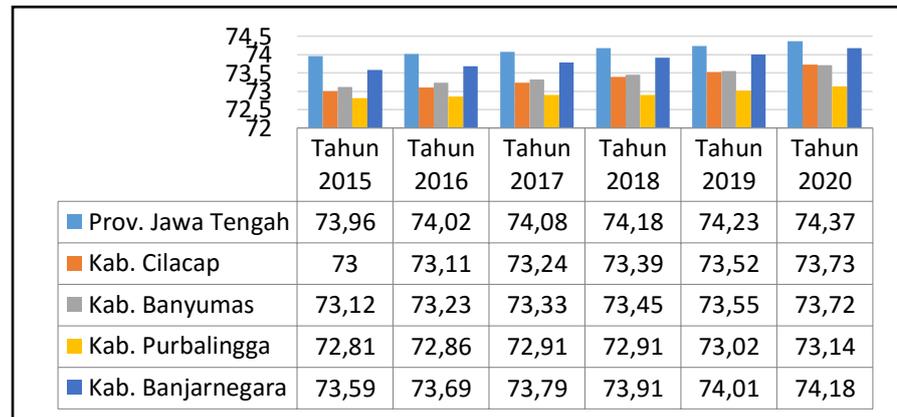
penduduknya yaitu Kecamatan Cilongok sebanyak 131.753 (7,03%) orang, Kecamatan Ajibarang sebanyak 108.407 orang (5,79%), dan Kecamatan Sumbang sebanyak 96.231 orang (5,14%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Purwojati sebanyak 39.840 orang (2,13%).

2) Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Dengan melihat dari harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.

Grafik 1.6

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyumas Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

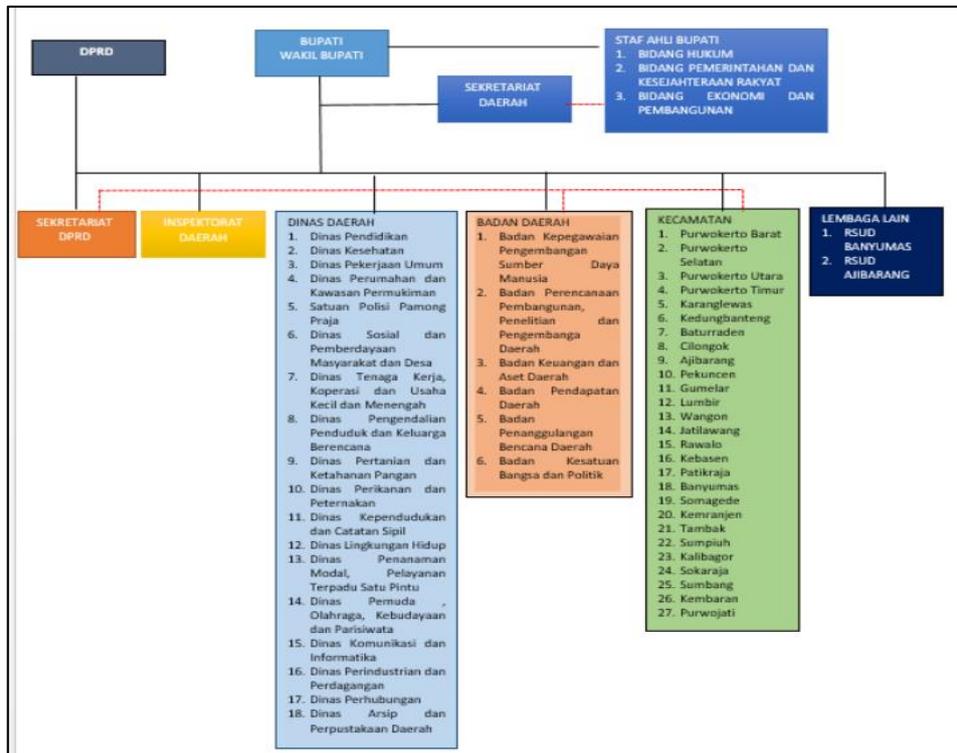
Dilihat dari jumlah perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Banyumas, dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 73,72 tahun, masih dibawah angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah 74,37 tahun.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21). Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas



3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis utama pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dalam lima tahun yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia untuk peningkatan



Gambar 1.3. bupati Banyumas memimpin Rakor tingkat Muspida



sumber daya manusia telah menjadi kesadaran bersama karena dengan persaingan yang semakin terbuka hanya sumber daya manusia yang kualitas yang bisa bersaing.

Peluang bonus demografi hanya bisa diraih dengan peningkatan sumber daya manusia, banyaknya penduduk usia produktif yang berkualitas akan mampu bersaing dan mandiri, serta mampu bekerja dan menabung untuk meningkatkan investasi. Sebaliknya meningkatnya usia produktif namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi beban dan melahirkan lingkaran kemiskinan berikutnya.

b. Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong pengembangan wilayah dengan meningkatkan produktivitas wilayah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi pengembangan potensi wilayah, dan meningkatkan kualitas



Gambar 1.4. Pengaspalan jalan

hidup masyarakat. Kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Namun demikian kinerjanya perlu dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi padi sebagai sumber pangan utama. Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang menentukan kedaulatan negara dan bangsa. Penyediaan infrastruktur dasar air minum, sanitasi, dan perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk di wilayahnya. Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi penduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi

semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

c. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Kabupaten Banyumas memiliki berbagai potensi daerah yang dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa sumber daya alam, penduduk



Gambar 1.5. Pasar Manis

sebagai sumber tenaga kerja, sumber daya buatan yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun sumber daya sosial yang berupa kelembagaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pengembangan seluruh potensi atau sumber daya tersebut dapat menciptakan berbagai peluang usaha untuk dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat, dan diharapkan akan menimbulkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu mengidentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah akan menyebabkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan daerah karena keterbatasan pendapatan daerah, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya.

d. Kemiskinan dan Pengangguran



Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas adalah 17,52%. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58%, dan angka kemiskinan Nasional sebesar 11,22%.

Permasalahan kemiskinan tidak lepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dari sisi tingkat kedalaman dan keparahan



Gambar 1.6. Rapat koordinasi pengentasan kemiskinan

kemiskinan, dapat dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2012-2013 menunjukkan trend menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 3,42 menjadi 3,24. Sedangkan Indeks Keparahakan Kemiskinan (P2) turun dari 0,91 menjadi 0,83. Menurunnya angka P1 dan P2 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil.

Kemiskinan merupakan akar berbagai permasalahan pembangunan. tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

e. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyumas belum mampu meningkat secara signifikan, salah satu penyebabnya adalah ketersediaan, penggunaan dan keterjangkauan sarana pendukung oleh petani belum optimal. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap.

Hasil analisis KLHS menunjukkan bahwa daya dukung pangan utama (padi) di Kabupaten Banyumas masih cukup baik. Namun pemerintah perlu melihat adanya tantangan penurunan produktivitas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian. Di sisi lain berdasarkan analisis KLHS jasa

ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Banyumas sebagian besar pada kelas rendah. Jasa ekosistem penyedia pangan tersebut meliputi bahan pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan, serta hasil peternakan. Selain faktor lahan pemerintah juga perlu memperhatikan pemeliharaan infrastruktur sebagai faktor yang mendukung produksi pertanian, akses dan distribusi sarana produksi pertanian serta pemasaran.

Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu menjadi pelopor kedaulatan Pangan, yaitu secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan dan Ketahanan Pangan menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan.



Gambar 1.7. Pengembangan bibit durian Bromo



Gambar 1.8. Peningkatan produksi padi di Kabupaten Banyumas

Kedaulata pangan hanya bisa dicapai jika prodktivitas pertanian dapat dioptimalkan.

f. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu utama dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun dimensi pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait lingkungan, sebagaimana 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan dan hukum dan tata kelola.



Gambar 1.9 Bupati Banyumas meninjau pengelolaan sampah dengan pemberdayaan magot

Hal ini menggambarkan bahwa keberlanjutan pembangunan bahkan keberlanjutan hidup manusia bergantung pada keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 daya dukung lingkungan di Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang menuju baik meliputi daya dukung pangan, daya dukung fungsi lindung dan daya dukung lahan terbangun dengan beberapa pengecualian di Kecamatan Purwokerto Timur. Daya dukung air di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dengan perkembangan penduduk dan pengembangan wilayah telah mengakibatkan penurunan daya dukung air, sehingga tanpa upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan Kabupaten Banyumas diproyeksikan mengalami defisit air pada tahun 2030.

Sementara itu kinerja layanan atau jasa ekosistem di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa mayoritas luasan jasa ekosistem penyedia bahan pangan, jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, dan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana berada pada kelas rendah. Perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan meningkatkan timbulan sampah dan emisi GRK yang mencemari lingkungan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga harus diupayakan agar

meminimalkan emisi GRK dan limbah, bahkan jika memungkinkan dilakukan sistem produksi terpadu tanpa limbah (*Zero waste*). Sementara pengelolaan sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia diupayakan terus dikurangi mulai dari sumbernya.

g. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di suatu daerah. Tanpa tata kelola yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.



Gambar 1.10. Bupati Banyumas memimpin rapat koordinasi di tingkat perangkat daerah

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping komitmen, kualitas sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi khususnya teknologi informasi serta mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) juga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun demikian infrastruktur pendukung penerapan *e-government* tersebut sampai saat ini belum optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dengan penggunaan anggaran yang makin efektif dan



efisien pembangunan dan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025.

Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto.

B. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengembangkan beberapa instrumen baik itu dalam perencanaan maupun dalam pengendalian pembangunan. Instrumen-instrumen tersebut diantaranya meliputi :

Gambar 1.11
Sistem Informasi yang Dibuat Dalam Mendukung Pengelolaan Kinerja





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari tahapan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) RPJP Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, yaitu tahap II (2010-2014), Tahap III (2015-2019) dan tahap III (2020-2025) diarahkan pada :

- a. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera.
- b. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang mandiri.
- c. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang maju dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai dokumen yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Untuk periode tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Banyumas disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah: **“MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”**.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan



kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

Adil-Makmur : Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

Mandiri : Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta



mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

2. MISI

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2018-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) **Tujuan 1** : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasarannya sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara
 - b) Meningkatnya intergritas pemerintahan daerah



- c) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
 - d) Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis elektronik terpadu
 - e) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 - f) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - g) Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin
 - h) Meningkatnya penangan bencana
- 2) **Tujuan 2** : Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut:
- a) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 - b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 3) **Tujuan 3** : Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasarannya sebagai berikut:
- a) Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin
 - b) Meningkatnya penanganan bencana
 - c) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - d) Menurunnya kesenjangan antar wilayah
 - e) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk
- 4) **Tujuan 4** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, dengan sasarannya sebagai berikut:
- a) Meningkatnya pertumbuhan industry pengolahan, perdagangan dan jasa
 - b) Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani
- 5) **Tujuan 5** : Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama.
- 6) **Tujuan 6** : Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dengan sasarannya sebagai berikut:
- a) Pembangunan kawasan industry dengan meningkatkan investasi padat karya.
 - b) Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan.



- 7) **Tujuan 7** : Meningkatkan ketersediaan dan kaulitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
- 8) **Tujuan 8** : Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sasarannya sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya industri pariwisata terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b) Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK
 - c) Meningkat kesempatan berusaha
- 9) **Tujuan 9** : Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
 - b) Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.
 - c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - d) Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah

Penjabaran misi, tujuan/sasaran indikator kinerja dan target indikator kinerja dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 2.1. Skema Misi, Tujuan/sasaran strategis, indikator kinerja

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68
2	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	72,55



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
		Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Persentase penduduk miskin	11,53
			Indeks Gini	0,307
			Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,3376
			PDRB per kapita	33.000
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB	6,45
			Nilai Tukar Petani (NTP)	101,33
4	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis,	Indeks Ketahanan Pangan	74,01
5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase nilai investasi daerah	2
			Indeks kualitas lingkungan hidup	63,88
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Indeks Daya Saing Infrastruktur	80,01
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata (wisaman dan wisnus)	5,86
			Persentase pertumbuhan industri kreatif	5
			Tingkat pengangguran terbuka	4,23
8	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	5
			Angka kriminalitas	792
			Indeks Demokrasi	79,3
			Persentase pelestarian budaya Banyumas	47,47

Sumber data: RPJMD Kab Banyumas 2018-2023



B. PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”, maka telah disusun arah kebijakan pembangunan daerah dengan pentahapan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai tahapan dalam pencapaian visi. Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, pembangunan di Kabupaten Banyumas dibagi dalam 5 (lima) arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. **Tahun 2019** : Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas pelayanan dasar, memantapkan kondusifitas wilayah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan
2. **Tahun 2020** : Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan
3. **Tahun 2021** : Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
4. **Tahun 2022** : Penguatan Daya Saing Menuju Daerah yang Maju dan Mandiri
5. **Tahun 2023** : Perwujudan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Adil-Makmur

Sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Banyumas Tahun 2020, disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia .
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur .
3. Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat .
4. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran .
5. Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan .
6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan .
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik .

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 01 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas. Adapun program Unggulan Bupati – Wakil Bupati dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 meliputi:



1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat,
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
9. Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan
10. Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
13. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
14. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
15. Program Peningkatan Investasi di Kawasan Industri
16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
17. Program Peningkatan Kesempatan kerja.
18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
19. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
20. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
21. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
22. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
23. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
24. Program Pengembangan Sistem Inovasi dan Kreativitas
25. Program Sosial Keagamaan
26. Program Pembinaan Keagamaan
27. Program Pelayanan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi

Kebijakan umum perencanaan pembangunan tersebut dijabarkan kedalam kebijakan perencanaan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati



Banyumas Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

N O	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,55
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1. Persentase penduduk miskin	%	11,53
		2. Indeks Gini	Indeks	0,307
		3. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3376
		4. PDRB per kapita	Juta Rp.	33.000
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	1. Persentase pertumbuhan PDRB	%	6,45
		2. Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	101,33
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,01
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1. Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2
		2. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	63,88



N O	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	80,01
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Persentase pertumbuhan kunjungan wisata (wisaman dan wisnus)	%	5,86
		2. Persentase pertumbuhan industri kreatif	%	5
		3. Tingkat pengangguran terbuka	%	4,23
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase penurunan konflik sosial	%	5
		2. Angka kriminalitas	kasus	792
		3. Indeks Demokrasi	Indeks	79,3
		4. Persentase pelestarian budaya Banyumas	%	47,47

Sumber data: Perjanjian Kinerja, 2020

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2020, yang ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.



2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) tahun 2020 ditetapkan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

NO	TUJUAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	105.788.277.889
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	837.051.570.000
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	15.406.593.664
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	21.583.641.305
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	952.141.835
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	26.242.076.797
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	246.787.708.801
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	8.943.823.932
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	10.538.930.167
JUMLAH		1.273.294.764.390

Sumber data: E-SAKIP, data diolah 2020









BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

A. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Hasil pengukuran atas indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

TUJUAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
TUJUAN 1						
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	68,76*	101,12	Sangat tinggi
TUJUAN 2						
Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,55	71,98	99,21%	Sangat tinggi
TUJUAN 3						
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan						
3.	Persentase penduduk miskin	%	11,53	13,26	85,00	Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas 2020

TUJUAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
4.	Indeks Gini	Indeks	0,307	0.3132*	97,98	Sangat tinggi
5.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3376	0,5*	51,90	Rendah
6.	PDRB per kapita	Juta Rp.	33.000	31,87*	96,56	Sangat tinggi
TUJUAN 4						
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian						
7.	Persentase pertumbuhan PDRB	%	6,45	-1,65	-25,58	Sangat rendah
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	101,33	104,05	102,68	Sangat tinggi
TUJUAN 5						
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis						
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,01	79,27	107,11	Sangat tinggi
TUJUAN 6						
Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja						
10.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2	41,53	2.076,50	Sangat tinggi
11.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63,88	70,04	109,64	Sangat tinggi
TUJUAN 7						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat						
12.	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	80,01	67,38	84,21	Tinggi
TUJUAN 8						
Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif						
13.	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata (wisaman dan wisnus)	%	5,86	-61,85	-1.055,46	Sangat rendah
14.	Persentase pertumbuhan industri kreatif	%	5	5,65	113%	Sangat tinggi
15.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,23	6	58,16	Rendah
TUJUAN 9						
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat						
16.	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	7,14	142,80	Sangat tinggi
17.	Angka kriminalitas	kasus	792	727	108,21	Sangat tinggi
18.	Indeks Demokrasi	Indeks	79,3	77,22	97,38	Sangat tinggi
19.	Persentase pelestarian budaya Banyumas	%	47,47	46,30	97,54	Sangat tinggi
RATA-RATA CAPAIAN					134,10	Sangat tinggi

Dilihat dari tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020



adalah sebesar 134,10 % dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Berdasarkan data capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut di atas, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

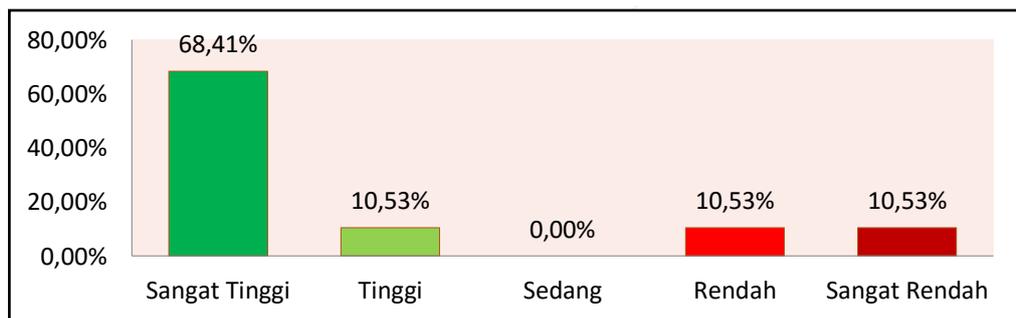
Tabel. 3.2. Predikat Kinerja Tahun 2020

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IK	%
1	Sangat tinggi	13	68,41
2	tinggi	2	10,53
3	Sedang	-	-
4	Rendah	2	10,53
5	Sangat rendah	2	10,53
JUMLAH IKU		19	100

B. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 3.1. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020



Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2020

Adapun pencapaian kinerja pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas nomor 70 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 telah dilakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh tim dari Kemenpan dan RB, namun sampai dengan selesai disusunnya laporan kinerja ini belum ada hasil evaluasi yang diperoleh. Sehingga capaian indeks reformasi yang disajikan pada laporan ini merupakan



hasil evaluasi tahun 2019. Secara lebih rinci realisasi capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	68	68,76*	101,12

Capaian kinerja tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 adalah sebesar 68,76 . Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			Tahun 2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,77	2,02
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,40	1,96
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,01	3,04
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,85	3,03
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,39	11,99
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,12	4,24
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,73	5,57
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,92	3,37
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	36,19	35,22
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,43	9,93
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,74	5,23
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,92	6,53
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Suvei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,40	8,85
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,49	33,54
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	66,68	68,76

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66,68	68,76	68,76*	75	91,68



Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018 sebesar 66,68 di tahun 2018 naik di tahun 2019 menjadi sebesar 68,76 dengan kategori “B”. Walaupun terdapat peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas, masih perlu dilakukan perbaikan yang setara pada tingkat Perangkat Daerah. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN.	1.861.837.500	1.230.040.460	66.07
2	Program Pengembangan Kompetensi ASN.	465.976.659	393.682.071	84.49
3	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN.	143.660.000	122.367.550	85.18
4	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN.	1.263.752.801	1.232.540.903	97.53
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.	2.840.661.990	2.734.139.222	96.25
6	Program Kesra.	783.141.084	511.971.284	65.37
7	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan.	1.679.500.000	1.459.673.400	86.91
8	Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.	12.261.200.000	11.293.532.563	92.05
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	267.151.926	190.888.652	71.45
10	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah.	498.345.403	270.586.141	54.03
11	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah .	945.328.000	575.817.968	60.91
12	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial.	198.137.500	126.411.400	63.08
13	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan.	34.300.000	26.473.500	77.18
14	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	59.996.150	59.996.150	100
15	Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa.	133.822.815	133.635.815	99.86



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	189.199.020	146.615.170	77.49
17	Program Informasi dan Layanan Hukum.	708.113.900	517.507.848	73.08
18	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan .	1.415.000.000	1.317.005.300	93.07
19	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi.	226.004.700	177.288.151	78.44
20	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian.	319.819.351	223.843.830	69.99
21	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	87.544.500	73.672.000	84.15
22	Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat.	3.763.200.000	2.266.957.600	60.24
23	Program Pelayanan Keprotokolan.	174.682.500	173.368.295	99.25
24	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	106.493.468	100.782.252	94.64
25	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	1.409.240.470	1.381.658.370	98.04
26	Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum.	9.173.200.000	7.881.878.695	85.92
27	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan.	251.916.557	240.943.217	95.64
28	Program Pembinaan Keagamaan.	690.273.912	608.735.769	88.19
29	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah.	927.946.975	777.805.675	83.82
30	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan.	640.470.202	636.002.341	99.03
31	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah.	108.469.649	55.636.360	51.29
32	Program Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTB.	465.584.500	448.672.600	96.37
33	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	174.180.120	149.280.900	85.07
34	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	226.288.500	125.168.900	73.67
35	Program Peningkatan Pendapatan Daerah.	169.914.800	142.505.960	50.48



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
36	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah.	282.314.726	683.469.720	76.77
37	Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran.	890.327.500	9.852.430.987	90.39
38	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah.	10.899.531.100	25.657.090.994	90.33
39	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keuangan Daerah.	28.403.000.000	686.781.650	93.46
40	Program Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB.	734.808.000	400.219.576	68.49
41	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	584.325.625	42.893.750	92.44
42	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	46.401.250	30.283.500	78.03
43	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.	38.810.000	825.154.748	85.03
44	Program Pengembangan E Government.	967.303.559	280.212.165	81.06
45	Program Peningkatan Keamanan Informasi.	343.385.380	2.955.632.538	91.26
46	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik.	3.238.577.000	6.166.389.902	96.09
47	Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika.	6.417.045.708	37.843.150	95.22
48	Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan.	39.743.150	100.621.531	88.58
49	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	113.600.000	797.003.568	83.35
50	Program Pengelolaan Informasi Admuduk.	956.244.940	217.054.800	92.44
51	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil.	234.809.800	29.760.370	100
52	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan.	29.761.770	5.797.660.215	84.07
53	Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan.	6.896.333.429	37.843.150	95.22

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain :

1. Mengoptimalkan fungsi tim reformasi internal melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD.



2. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi di tingkat OPD.
3. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukannya secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Pemkab Banyumas.
4. Meningkatkan pengetahuan terhadap assesor PMPRB Pemkab Banyumas tentang kondisi ideal yang diharapkan pada masing-masing area perubahan.
5. Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan.
6. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Banyumas.
7. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala.
8. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada pencapaian kinerja yang dihasilkan.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SOP.
10. Meningkatkan implementasi pengelolaan arsip di tingkat Pemda dan OPD.
11. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain melakukan *assesment* pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*.
12. Meningkatkan implementasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, penerapan SPIP dan *Whistle Blowing System*.
13. Meningkatkan penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Pemkab Banyumas sehingga dapat semakin mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi.
14. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik di tingkat OPD dalam hal pemberian *reward/punishment* kepada pemberi layanan, menginformasikan hasil survey eksternal kepada *stakeholder* serta



menindaklanjuti hasil survey eksternal terutama terhadap komponen survey yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.



Gambar 3.1 Penerimaan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	72,55	71,98	99,21

Data BPS Jawa Tengah, 2020

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,49	71,96	71,98	74,35	96,81

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan dengan indikator



Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2020 yaitu 71,98, dari target sebesar 72,55 atau mencapai 99,21%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2020 ini mencapai 96,81%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan pad metode baru dirubh menjadi angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Komponen Indeks Pembangunan Manusia :

- a. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir (*Expectation of life/Eo*), merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi baru lahir pada tahun tersebut.
- b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) *Expected Years of Schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.



c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal.

d. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan oleh nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020

Komponen IPM	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Angka harapan hidup	73,12	73,23	73,33	73,45	73,52	73,72
Harapan Lama Sekolah	12,57	12,58	12,63	12,64	12,82	12,85
Rata-rata Lama Sekolah	7,31	7,39	7,40	7,41	7,42	7,52
Disparitas Daya Beli	10.104	10.554	10.713	11.240	11,703	11.448
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96	71,98

Sumber : BPS Kab Banyumas, 2020

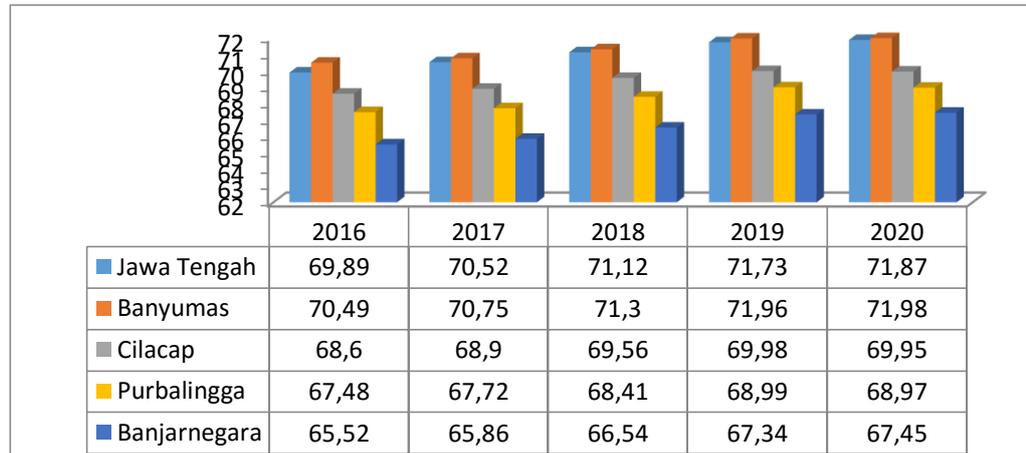
Pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia. IPM Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu yang



tertinggi di BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dan selalu lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 3.2

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2016 s.d 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	7.601.829.590	5.898.423.871	77,59
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan.	326.884.960	289.676.150	88,62
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.	729.182.802	423.491.552	58,08
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat.	69.134.221.406	58.897.658.667	85,2
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	154.495.473.909	154.071.053.119	99,73
6	Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan.	2.241.250.000	2.084.185.002	93
7	Program Peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan	37.668.863.000	37.489.114.500	99,52



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.	17.302.669.910	15.655.282.624	90,48
9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata. Dinas Kesehatan	4.000.000.000	3.994.942.525	99,87
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata. RSUD Banyumas	20.180.193.000	18.291.327.020	90,64
11	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata. RSUD Ajibarang	14.600.778.000	13.639.043.208	93,41
12	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.	148.906.800	85.424.800	57,37
13	Program Pelayanan Kesehatan.	35.604.762.500	21.065.074.131	59,16
14	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD. RSUD Ajibarang	81.614.350.765	76.939.505.423	94,27
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	4.968.237.350	4.968.237.350	100
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	6.766.695.040	5.980.872.039	88,38
17	Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan.	234.000.000	213.788.744	91,36
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	15.589.941.400	12.845.235.995	82,39
19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	51.280.983.977	41.413.564.702	80,76
20	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.	201.880.500	187.608.738	92,93
21	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD.RSU Banyumas	195.435.309.073	192.738.210.298	98,62
22	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	4.149.240.000	3.213.325.488	77,44



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
23	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.	188.000.000	179.179.800	95,31

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM antara lain :

1. Belum meratanya sarana prasarana sekolah dan masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah dimana Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah masih rendah dimana indikator tersebut menjadi komponen indikator IPM.
2. Kurangnya pemahaman kesehatan masyarakat dengan banyaknya angka kematian ibu melahirkan dan gizi buruk.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Meningkatkan angka Partisipasi Masyarakat yang akan berdampak dengan naiknya Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sehingga pembangunan manusia akan semakin meningkat. Menekan Anak Tidak Sekolah dengan fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak tidak sekolah karena Kebutuhan Khusus, anak yang putus sekolah karena ekonomi dan anak yang tidak melanjutkan karena tidak ada biaya melanjutkan.
2. Penyebaran kualitas dan kuantitas pendidik perlu ditingkatkan dengan menambah pendidik yang sesuai dengan kompetensinya dan yang mempunyai kualitas yang ditentukan.
3. Mengadakan pelatihan khusus pendidik terhadap pembelajaran bagi guru yang belum memenuhi kualitas yang ditentukan seperti guru, harus bisa IT karena tuntutan perkembangan jaman.
4. Meningkatkan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Promosi Kesehatan dan program perbaikan gizi masyarakat sebagai upaya untuk mencapai pembangunan manusia dalam komponen Usia Harapan Hidup.

Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pembangunan yang beradilan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) indikator utama, dengan capaian sebagai berikut :



Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Penduduk Miskin	%	11,53	13,26	85,00
Indeks Gini	Indeks	0,307	*0,3132	97,98
Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3376	*0,5	51,90
PDRB Per Kapita	Juta Rp.	33	31.870	96,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Penduduk Miskin	%	17,05	12,53	13,26	8,56	45,09
Indeks Gini	Indeks	0,31	*0,3132	*0,3132	0,304	96,97
Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,01	*0,5638	*0,5	0,3256	46,44
PDRB Per Kapita	Juta Rp.	29.230	31,870	*31.870	38.655	82,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Capaian indikator indeks gini dan Indeks Ketimpangan Williamson, menggunakan capaian tahun lalu, karena sudah tidak dirilis oleh BPS. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin

Selama periode tahun 2015 – 2020, penduduk miskin di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Adapun jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	286,00	17,52
2016	283,90	17,23



Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	283,20	17,05
2018	226,2	13,5
2019	211,6	12,53
2020	225,90	13,26

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Grafik 3.3. Persentase penduduk miskin



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Naiknya angka kemiskinan tahun 2020 dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- a. Dampak pandemi covid-19 yang menimpa di seluruh negara. Dengan pandemi covid-19 ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di hampir semua sektor lapangan pekerjaan sehingga menciptakan pengangguran yang berdampak pada turunnya penghasilan/pendapatan. Selain itu juga berdampak pada UMKM yang mengalami penurunan omzet secara drastis karena daya beli masyarakat menurun. Dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap para pekerja di Kabupaten Banyumas yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 324 orang , pekerja yang dirumahkan sebanyak 2.388 orang (sumber data Dinakerkop UKM tahun 2020).
- b. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 juga memberi dampak multisektoral yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat terlebih aspek perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016–2019 telah mengalami penurunan, meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 Persentase



penduduk miskin Kabupaten Banyumas meningkat sebesar 0,74% dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26 % pada tahun 2020.

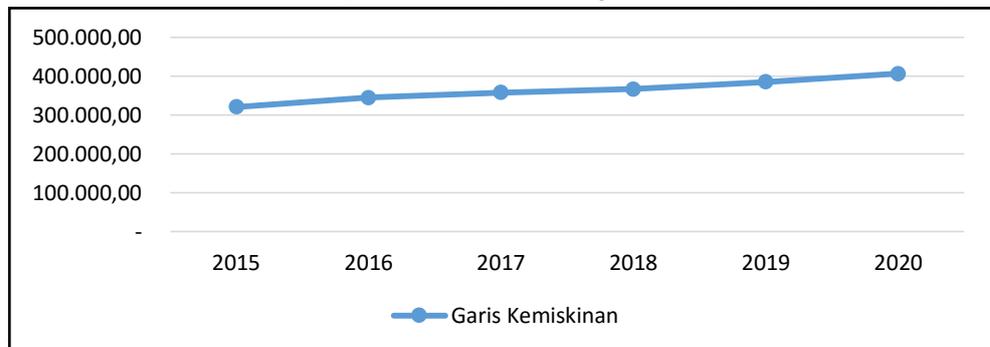
Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp.320.585,00 kemudian meningkat sampai di tahun 2019 menjadi Rp. 385.140,00 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 406.250,00. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Tabel 3.14
Garis Kemiskinan Tahun 2015 sampai dengan 2020.

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	320.585	344.514	357.748	366.442	385.140	406.250

Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2020

Grafik 3.4
Garis Kemiskinan Tahun 2015 sampai dengan 2020 (Rp/kapita/bulan).



Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2020

Indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banyumas selama periode 2015 hingga 2020 cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 2,91% dan terus mengalami penurunan hingga di tahun 2020 sebesar 2,25%.



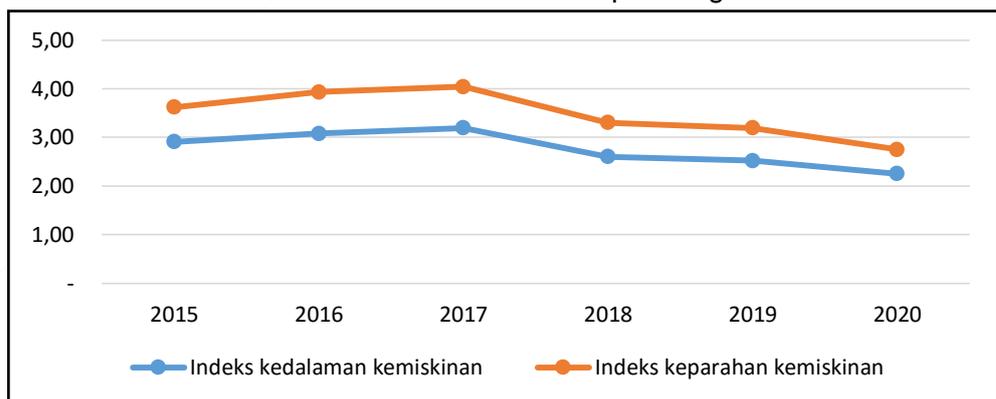
Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tidak berbeda jauh dengan Indeks kedalaman kemiskinan, maka indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, kecuali untuk tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan tidak berubah dari tahun sebelumnya. Penurunan di tahun 2018 sebesar 0,15 poin, kemudian di tahun 2019 penurunan sebesar 0,67 dan untuk tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,17 poin sehingga indeks keparahan kemiskinan di tahun 2020 sebesar 0,50%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahhan Kemiskinan tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahhan Tahun 2015 s.d 2020.

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,91	3,08	3,19	2,6	2,52	2,25
Indeks Keparahhan Kemiskinan	0,71	0,85	0,85	0,7	0,67	0,50

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

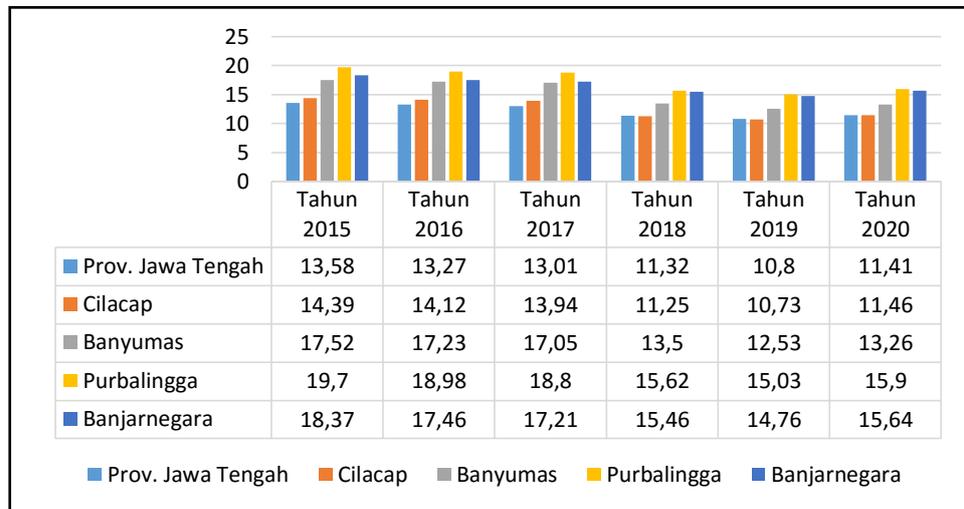
Grafik 3.5
Garis Kemiskinan Tahun 2015 sampai dengan 2020.



Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2020

Angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas selalu mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten tetangga adalah sebagai berikut :

Grafik 3.6
Perbandingan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Tetangga Tahun 2015 sampai tahun 2020



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2020

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun masih perlu upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih diprioritaskan di daerah perdesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”. Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.



Gambar 3.2 Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Gambar. 3.3. Rehabilitasi pasar tradisional

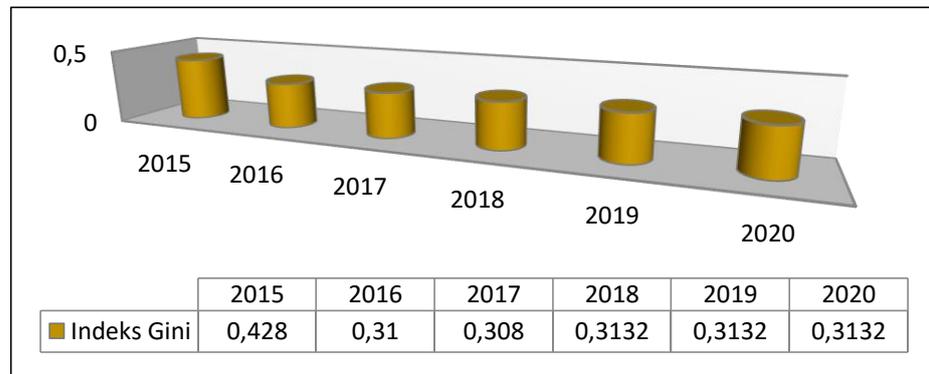
2. Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai indeks gini mendekati nilai 0 (nol), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai indeks gininya mendekati 1 (satu).

Perkembangan Indeks Gini di Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2019 menunjukkan angka yang cenderung membaik. Realisasi Indeks Gini Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebesar 0,31 dari target sebesar 0,307 atau mencapai target 97,98 %. Realisasi ini masih menggunakan realisasi tahun 2019 , karena mulai tahun 2019, BPS tidak merilis indeks gini. Indeks Gini Tahun 2015 sampai dengan 2020 cenderung fluktuasi, dimana tahun 2016 mengalami penurunan angka absolut dari tahun sebelumnya (Tahun 2015). Meskipun masih tergolong ke dalam ketimpangan distribusi sedang, namun hal tersebut mencerminkan distribusi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 lebih merata dibanding tahun 2017. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil ke Kabupaten Banyumas. Nilai Indeks Gini di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.7
Indeks Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020



Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPS, data tahun 2020 belum rilis

Data di atas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan perkapita per keluarga di Kabupaten Banyumas dalam keadaan cukup merata (ketimpangan sedang). Namun yang harus diperhatikan adalah secara runut waktu, dari tahun ke tahun Indeks Gini Kabupaten Banyumas masih fluaktif, namun secara umum menunjukkan tren menurun.

Dengan pandemi covid-19 tahun 2020 yang sangat berpengaruh terhadap segala aspek, dimungkinkan terjadi penurunan indeks karena adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2019 yaitu 12,53 naik menjadi 0,72% sehingga pada tahun 2020 menjadi 13,26%. Penurunan kemiskinan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau semakin berkurangnya masyarakat miskin, sehingga kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya juga semakin menipis. kadang menunjukkan gejala naik.

Ada tiga kemungkinan penyebab meningkatnya Indeks Gini:

- Meningkatnya jumlah penduduk. Penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2020 berjumlah 1.873.196 orang, naik 33.044 orang dari tahun 2019 sejumlah 1.840.152 orang sehingga peningkatan jumlah penduduk ini berpotensi menurunkan pendapatan perkapita.
- Laju inflasi, dimana inflasi Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah 1,90 sementara inflasi tahun 2019 adalah 2,28 sehingga dengan turunnya inflasi menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat yang mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan pada masyarakat.
- Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Banyumas.



Dalam rangka menurunkan indeks gini, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan upaya antara lain :

- a. Optimalisasi pemasaran penanaman modal, dengan mempermudah berinvestasi di Kabupaten Banyumas berupa Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berdiri pada tahun 2019, yang melayani 134 perizinan di Kabupaten Banyumas.



Gambar. 3.4 Mall Pelayanan Publik



Gambar.3.5. Tugu Gada Rujakpolo Underpass Jenderal Soedirman

- b. Perbaikan infrastruktur bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas baik sarana perhubungan, kesehatan maupun pendidikan.

3. Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju dan daerah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Banyumas menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson memberikan gambaran tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ditinjau dari aspek penyebaran hasil pembangunan. Angka indeks Williamson yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antar wilayah



yang semakin kecil. Hasil perhitungan indeks Williamson Kabupaten Banyumas tahun 2014 mencapai 0,3546 dan tahun 2015 meningkat sampai dengan 0,35901 dan tahun 2016 menurun mencapai 0,3543 dan menurun kembali di tahun 2017 sebesar 0,3496, dan di tahun 2018 naik menjadi 0,5. Hasil perhitungan indeks williamson sampai dengan tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019 yaitu sebesar 0,5 karena mulai tahun 2019 BPS tidak merilis indeks Ketimpangan Williamson. Realisasi indeks ketimpangan antar wilayah dari tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.8
Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Banyumas
Tahun 2015-2020



Sumber : Bappedalitbang dan BPS Kab. Banyumas

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah antara lain

1. Migrasi penduduk produktif yang memiliki *skill* / terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar dan kesempatan merubah masa depan yang lebih baik.
2. Investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang karena faktor market, lokasi, dan kesempatan kerja, dimana keuntungan relative lebih besar, demikian pula resiko kerugian relative lebih kecil pada umumnya.
3. Kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sosial dan ekonomi capital di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar dan sebagai pusat pemerintahan.

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan



terjadinya ketimpangan tersebut. Ketimpangan yang dimaksud disini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu wilayah. Upaya-upaya tersebut meliputi :

- 1) Penyebaran pembangunan prasarana perhubungan.
- 2) Pengembangan pusat pertumbuhan
- 3) Pengembangan sektor pertanian yang memiliki peranan paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
- 4) Pengembangan agribisnis dengan basis padat karya
- 5) Peningkatan anggaran pembangunan untuk pembiayaan perbaikan dan pengembangan infrastruktur maupun kualitas pendidikan dan kesehatan.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pembangunan Kabupaten Banyumas beberapa tahun belakangan terbilang sangat pesat. Sampai dengan selesainya disusun laporan ini, data tahun 2020 belum rilis, sehingga menggunakan data tahun 2019.

Kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 2019 sebesar 6,32%. Nilai tambah yang tercipta tahun 2019 menurut Produk Domestik Regional (PDRB) menurut lapangan usaha di wilayah Banyumas sebesar 53,94 trilyun rupiah, sementara menurut harga konstan 2010 angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar 39,77 trilyun rupiah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk**. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kepala atau per satu orang penduduk selama satu tahun.



Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tercatat sebesar 23,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,87 juta rupiah. Kenaikan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Banyumas yang sudah tidak terpengaruh oleh inflasi dapat dilihat pada Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan. Sejak tahun 2015 hingga 2019 juga senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan tercatat sebesar 19,05 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 23,50 juta rupiah.

Tabel 3.16
Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Perkapita Adhb (Juta)	PDRB Perkapita Adhk (Juta)
2015	23,72	19,05
2016	25,46	20,03
2017	27,38	21,11
2018	29,72	22,28
2019	31,87	23,50

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019

Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku di eks Karesidenan Banyumas tahun 2017 sampai 2019 dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel. 3.17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (juta Rp/tahun) Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Cilacap	60,94	64,51	66,12
Banyumas	27,38	29,72	31,87
Purbalingga	23,39	25,07	26,68
Banjarnegara	20,34	21,87	23,39
Jawa Tengah	34,22	36,78	39,24

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019



Pembangunan secara menyeluruh dapat dikatakan berhasil apabila dinilai dengan suatu indikator dan memiliki keterbandingan dengan wilayah lainnya. Penilaian dapat didasarkan pada indikator sosial, indikator ekonomi dan indikator social ekonomi. Indikator social diantaranya adalah data kependudukan, data ketenagakerjaan dan data kemiskinan. Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di Indonesia, dan 4,87% diantaranya mendiami wilayah Kabupaten Banyumas. Angka rasio ketergantungan Banyumas tahun 2019 (49,16) masuk dalam kategori rendah karena dibawah 50%, tetapi masih di atas rasio ketergantungan Provinsi Jawa Tengah (47,75). Semakin rendah angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel. 3.18. Realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.	767.308.162	738.089.088	96.19
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.	603.311.024	463.945.334	76.09
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	688.193.150	631.685.000	91.79
4	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.	700.000	700.000	100
5	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	2.138.420.966	2.058.130.966	96.25
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.	100.000.000	98.851.500	98.85
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.	973.481.534	380.426.005	39.08



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
8	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	301.375.151	300.772.651	99.08
9	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender .	78.916.089	78.906.089	99.99
10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	440.797.088	353.212.134	80.13
11	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.	48.049.000	48.049.000	100
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	162.326.400	152.433.240	93.91
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.	492.887.600	464.703.890	94.28
14	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.	79.934.000	74.934.550	93.75
15	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa .	4.880.500	4.880.500	100
16	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	71.342.000	71.342.000	100
17	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB.	7.627.505.000	3.381.806.913	44.34
18	Program Pelayanan Keluarga Berencana.	827.166.000	659.877.500	79.78



Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Rata-rata capaian kinerja tujuan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,45	-1,65	-25,58
Nilai Tukar Petani	Indeks	101,33	104.05*	102,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,45	6,32	-1,65	6,65	-24,81
Nilai Tukar Petani	Indeks	100,33	104.05	104.05*	102,86	101,16

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2020

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat dilihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi dan berbagai inovasi di bidang sosial. Dengan adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 memberi dampak multisektoral yang berpengaruh terhadap seluruh sektor perekonomian



masyarakat, sehingga prediksi angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas hanya mencapai -1,5%.

PDRB Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2020 sebesar 53.682 trilyun rupiah, sementara menurut harga konstan 2010 angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar 39,121 trilyun rupiah (BPS Banyumas, 2020). Adapun rincian persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas, tahun 2017 s.d 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas

SEKTOR PDRB		2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,15	12,73	11,99	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	5,56	5,72	5,53	5,57
C	Industri Pengolahan	24,32	24,34	24,66	25,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,08
F	Konstruksi	12,82	13,25	13,20	12,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,19	15,28	15,57	15,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,49	3,56	2,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	3,30	3,33	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,67	4,66	4,89	5,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	3,22	3,15	3,23
L	Real Estate	2,23	2,20	2,18	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,32	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,06	2,98	3,00
P	Jasa Pendidikan	5,40	5,51	5,64	5,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	1,00	1,00	1,11



	SEKTOR PDRB	2017	2018	2019	2020
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,78	1,75	1,82	1,75

Sumber : Data BPS Banyumas, 2020

Adapun rincian laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dari masing-masing Kabupaten di wilayah Barlingmascakeb adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Laju Pertumbuhan PDRB) atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha di Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2015 – 2020

Kabupaten	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Cilacap	5,96	5,09	2,58	2,99	2,27	-10,36
Banyumas	6,12	6,05	6,34	6,45	6,32	-1,65
Purbalingga	5,47	4,85	5,37	5,42	5,65	-1,23
Banjarnegara	5,47	5,44	5,65	5,67	5,60	-1,32
Kebumen	6,18	5,01	5,15	5,53	5,52	-1,46

Sumber : BPS Jawa Tengah , 2020

Sektor industri dan perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan PDRB di kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020 sektor ini mengalami penurunan yang drastis. Ditunjukkan pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB sebesar 6.32% dan pada tahun 2020 pertumbuhannya negatif 1.65%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan negatif di tingkat nasional dan propinsi Jawa Tengah.

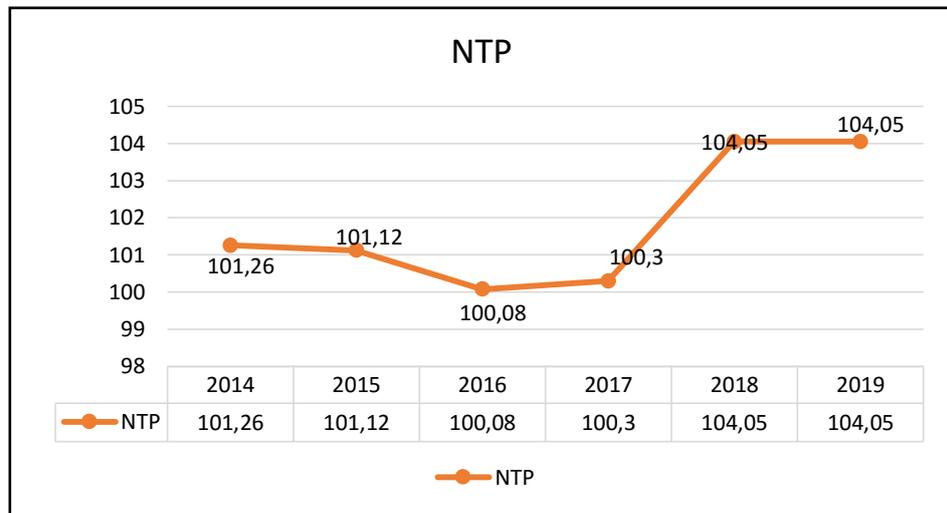
2. Nilai Tukar Petani

Untuk melihat keberhasilan pembangunan khususnya di sektor pertanian, selain data tentang pertumbuhan ekonomi juga diperlukan data pengukur daya tukar petani mengingat petani merupakan pelaku utama di sektor pertanian. Daya tukar petani dapat diketahui melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual, Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan adanya daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi.

Capaian Nilai Tukar Petani pada Kabupaten Banyumas untuk tahun 2020 belum rilis, sehingga dalam laporan ini tercantum nilai tukar petani tahun 2019 yaitu sebesar 104,05. Hal ini berarti petani masih mengalami surplus, atau harga produksinya masih lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi (pendapatan petani masih lebih besar dari pengeluarannya). Adapun capaian Nilai Tukar Petani dari tahun 2014– 2019 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.9
Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2019



Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan Nilai Tukar Petani adalah rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP). Faktor-faktor penyebab rendahnya Nilai Tukar Petani antara lain :

1. Masih terbatasnya pengembangan hasil olahan agroindustri sektor pertanian.
2. Masih terbatasnya pembinaan /pendampingan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif .
3. Masih terbatasnya penyediaan sarana produksi dan teknologi budidaya ikan.

Dalam mengatasi hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mengembangkan komoditas hasil agroindustri berupa hasil olahan sektor pertanian agar memiliki nilai tambah ekonomis, membuka lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk pertanian.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.
3. Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian, komoditas unggulan pertanian.
4. Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan

dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan.

5. Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi.



Gambar 3.6 Bupati Banyumas dalam acara pelatihan kewirausahaan bidang ketahanan pangan Kabupaten Banyumas



Gambar 3.7 Panen melon di Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang

6. Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan safety belt.



Gambar 3.8 Program safety belt untuk penderes di Kabupaten Banyumas

Capaian kinerja tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.23. realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Penataan Struktur Industri.	509.045.370	450.527.631	88.05
2	Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian.	85.759.257	85.746.657	99.99
3	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I.	515.000.000	489.697.688	95.09
4	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	88.529.650	84.837.900	95.83
5	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat.	465.000.000	404.268.019	86.94
6	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.	9.766.101.000	4.331.725.954	44.35
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.	505.878.650	436.736.319	86.33
8	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II.	771.000.000	687.489.641	89.17
9	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur .	490.000.000	437.322.630	89.25



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.	215.500.000	206.824.300	95.97
11	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan.	44.993.000	44.993.000	100
12	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.	321.647.058	222.462.958	69.16
13	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan.	705.810.500	569.157.500	80.64
14	Program Perlindungan Tanaman.	93.523.900	49.406.400	52.83
15	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian.	77.399.130	77.399.130	100
16	Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT.	400.000.000	380.086.090	95.02
17	Program Penyediaan Daging Ternak ASUH.	200.000.000	190.625.002	95.31
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	34.047.560	34.047.560	100
19	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian.	2.736.596.000	2.727.211.500	99.66
20	Program Penyediaan Benih Pertanian.	291.000.000	289.973.120	99,65
21	Prpgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan.	233.000.000	289.973.120	99.65
22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	959.922.300	214.461.750	92.04
23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.	43.566.550	691.015.939	71.99
24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.	76.376.150	43.566.550	100



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
25	Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar.	350.000.000	74.020.100	96.92
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.	666.501.780	330.885.295	94.54
26	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian.	937.443.450	822.570.868	87,75

Tujuan 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis maka ditetapkan satu indikator yaitu indeks ketahanan pangan. Adapun capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,01	79,27	107,11

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.25
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,99	73,99	79,27	74,04	107,06

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan



Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat Kabupaten/Kota.

Capaian indikator indeks ketahanan pangan Kabupaten Banyumas masih menggunakan capaian tahun 2019, karena sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, capaian tahun 2020 belum dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Adapun capaian indeks ketahanan pangan tahun 2019 untuk Kabupaten Banyumas adalah sebesar 79,27. Capaian ini berada pada kelompok IKP tingkat 6 dengan range >75,68. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. *Cut Off Point* IKP merupakan penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). *Cut off point* indikator individu disajikan dalam tabel berikut :

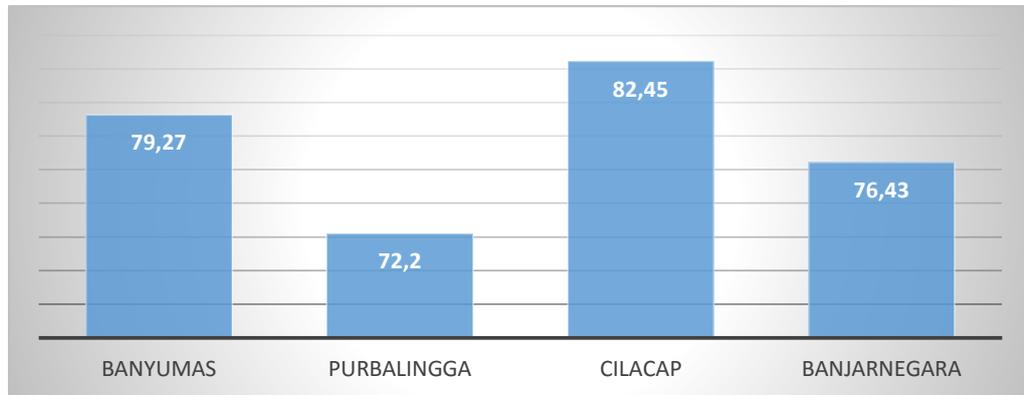
Tabel 3.26
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$
2	$>41,52 - 51,42$	$>28,84 - 41,44$
3	$>51,42 - 59,58$	$>41,44 - 51,29$
4	$>59,58 - 67,75$	$>51,29 - 61,13$
5	$>67,75 - 75,68$	$>61,13 - 70,64$
6	$>75,68$	$>70,64$

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Apabila dibandingkan dengan kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas adalah nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap. Adapun grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut :



Grafik 3.10
Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019



Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019

Masalah yang berkaitan dengan pangan di masa mendatang memiliki multidimensi baik yang bersifat lintas bidang, lintas komoditas, lintas daerah dan lintas penduduk. Berdasar kenyataan tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, maka strategi pemantapan ketahanan pangan di masa depan perlu mengantisipasi berbagai kondisi tersebut. Pendekatan pembangunan ketahanan pangan dimasa depan perlu memprioritaskan ketahanan pangan tingkat rumah tangga/individu. Dalam hal ini peran serta pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama strategi peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. Sementara itu pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut adalah melalui pemberdayaan kelembagaan lokal seperti lumbung desa dan peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan pangan. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.27. Realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan.	446.810.010	446.358.410	99.90
2	Program Penguatan Cadangan Pangan.	505.331.825	504.358.443	99.81

Strategi yang dikembangkan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan antara lain :



1. peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan serta pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan .
2. penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah terjaga, penggunaan pestisida untuk memberantas hama yang merusak tanaman, melakukan penanaman bibit unggul yang dapat menghasilkan produksi pangan yang tinggi, cepat dan tahan hama .
3. mekanisme pertanian dalam upaya meningkatkan mutu hasil dan meningkatkan efisiensi usaha tani seperti penggunaan mesin penanam, traktor dan pompa irigasi.

Tujuan 6 : Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja.

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik berinvestasi. Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

1. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kaveling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai.
2. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha.
3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Pembangunan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, bertujuan untuk :

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang.
2. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
3. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah.
4. Meningkatkan daya saing industri.
5. Meningkatkan daya saing investasi.
6. Memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait.



Dalam rangka mewujudkan tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja, maka ditetapkan dua indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	41,53	2.076,50
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,88	70,04	109,64

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.29
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	23,10	21,86	41,53	10	415,3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,81	64,62	70,04	64,15	109,18

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut :

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Investasi bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya serta bertujuan menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.30
Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas tahun 2015 - 2020

TW	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
I	169.576.774.759	112.814.028.632	44.202.980.000	178.562.500.000	174.475.470.048	243.386.640.000
II	104.309.494.164	120.953.286.770	149.889.870.000	333.733.758.234	209.076.041.748	345.808.420.000
III	65.642.520.955	102.266.881.857	19.537.830.000	98.104.720.014	174.269.585.197	214.334.320.000
IV	270.006.455.714	109.620.425.890	294.065.470.000	14.579.221.752	203.800.287.880	274.426.400.000
Total	609.535.145.592	445.654.623.149	507.696.150.000	625.000.200.000	761.621.384.575	1.077.955.780.000

Sumber : DPMPTSP, 2020

Perkembangan investasi di Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Dilihat dari pertumbuhan nilai investasi untuk tahun 2020 dari tahun 2019 adalah sebesar 141,53 %. Sedangkan persentase pertumbuhan nilai investasi daerah meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020 naik hingga mencapai 414,59 % disebabkan :

1. Dilakukan upaya persuasif kepada para investor sehingga mereka yang belum melaporkan nilai investasinya bersedia melaporkannya ke DPMPTSP.
2. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP), menyebabkan perizinan menjadi cepat, sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.
3. Untuk investor dengan perizinan yang kurang lengkap dapat segera dilayani di Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.



Gambar 3.9 Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kab. Banyumas



Realisasi investasi di Kabupaten Banyumas pada 2020 mencapai Rp 1,077 triliun. Pencapaian ini melampaui target investasi baik dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun target yang telah ditentukan pemerintah pusat. Sesuai dengan target RPJMD dengan periode 5 tahun sebesar Rp 260 miliar, sedangkan target investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 1,07 triliun. Capaian realisasi investasi tersebut pertama dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi dominan Rp 1,075 triliun (99,73%) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 2,926 miliar (0,27%).

Pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2020 terdiri dari dari sektor primer (pertanian dan pengolahan hasil pertanian), sektor sekunder (kontruksi, industri dan pertambangan) serta sektor tersier (hotel, restoran, pergudangan, perdagangan dan jasa). Pencapaian investasi terbesar pada sektor tersier dengan nilai investasi Rp 988.749.100.336,- dari total investasi sebesar Rp 1.077.955.780.832,-. Nilai capaian investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31. Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan sektor triwulan I-IV tahun 2020

NO	SEKTOR	PMA	PMDN	JUMLAH
1	SEKTOR PRIMER	-	205.000.000	205.000.000
2	SEKTOR SEKUNDER	1.133.280.495	87.868.400.000	89.001.680.495
3	SEKTOR TERSIER	1.792.800.336	986.956.300.000	988.749.100.336
JUMLAH		2.926.080.832	1.075.029.700.000	1.077.955.780.832

Sumber : DPMPTSP, 2020

Adapun faktor yang mempengaruhi investasi di Kabupaten Banyumas terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lingkungan internal :

- a. tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah dibidang investasi serta kebijakan antara sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, semua itu mengakibatkan ketidakpastian kebijakan investasi nasional, sehingga menurunkan niat untuk berinvestasi.



- b. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor.
 - c. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya .
2. Lingkungan eksternal yaitu ketidakpastian ekonomi global.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan adanya Mal Pelayanan Publik, dimana proses perizinan dipermudah melalui sistem online.
2. Menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait dengan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Banyumas.
3. Mengembangkan kawasan peruntukkan industri dengan memprioritaskan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dan SKPD teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal
5. Melaksanakan sosialisasi tentang informasi, pengaduan, data dan system informasi pelayanan perizinan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memiliki perizinan terhadap setiap usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal
7. Mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan, serta PTSP bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh instansi terkait baik tingkat provinsi maupun pusat
8. Meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.



Gambar 3.10 Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas



Gambar 3.11 Bupati Banyumas melakukan pengecekan pabrik garmen di Kalibagor

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjelaskan kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyumas, maka telah disusun Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 sebagai gambaran kondisi lingkungan hidup Kabupaten Banyumas terkini. Laporan tahun 2019 merupakan yang disusun di tahun 2020 dan berisikan data pengukuran/pemantauan kualitas lingkungan hidup sepanjang tahun 2019. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang tekanan terhadap lingkungan sebagai akibat timbulnya perubahan media lingkungan (air, udara, tutupan lahan) akibat dari kegiatan manusia. Selain itu juga menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Banyumas. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusun/pengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mempunyai ruang lingkup yaitu :



- a. Konsep IKLH hanya mengambil 3 (tiga) indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan lahan selama 1 (satu) tahun dengan sumber data tahun 2019.
- b. Perbandingan atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan baku mutu air sungai dan baku mutu udara ambien.
- c. Analisis data yang digunakan untuk menghitung IKLH menggunakan kriteria, yaitu : (1) kualitas air yang diukur berdasarkan parameter-parameter DO, *fecal coliform*, COD, pH, BOD, NH₃-N, *total phospat*, TSS, NO₃-N dan TDS; (2) Kualitas udara yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂ ; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dihitung berdasarkan hasil pantauan kualitas air sungai prioritas, hasil pantauan kualitas udara ambien pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industri, dan komersial serta hasil analisis tutupan lahan dan dinamika vegetasi tahun 2019.

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang juga diiringi tumbuhnya sektor perindustrian, maka secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas maupun kuantitas dari air sebagai akibat dari pencemaran oleh berbagai polutan. Kualitas air sungai merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologis. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Di lain pihak, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah, sehingga menyebabkan kualitas air sungai semakin menurun. Selain itu, dapat dikatakan bahwa isu pencemaran air merupakan masalah global, tidak saja dihadapi oleh Pemerintah Indonesia tetapi juga dihadapi oleh sebagian besar Negara-negara di dunia.

Kualitas air diindikasikan dari pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi tingkat terjadinya pencemaran air dan sumber air. Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena dijadikan sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi



sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Banyumas, dilakukan di 30 titik sungai di wilayah Kabupaten Banyumas yang dilakukan selama 3 kali dalam 1 tahun (bulan April, Agustus dan November). Sample kemudian diuji di laboratorium untuk diketahui kadar DO (*Dissolved Oxygen*), *Fecal Coliform*, COD (*Chemical Oxygen Demand*), pH, BOD (*Biological Oxygen Demand*), NH₃-N, Total Phosphat, NO₃-N dan TDS (*Total Dissolved Solid*). Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dengan menggunakan metode indeks Pencemaran (*Pollution Index*) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Penentuan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.32
Nilai dan status Indeks Kualitas Air (IKA)

No	Nilai Indeks Pencemaran	Nilai IKA	Status
1.	0 - 1	100	Memenuhi
2.	>1 - 4,67	80	Ringan
3.	>4,67 – 6,42	60	Sedang
5.	> 6,32 – 6,88	40	Berat
6.	> 6,88	20	Sangat berat

Sumber : IKLH Nasional 2019

Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut:

- 70 untuk memenuhi baku mutu,
- 50 untuk tercemar ringan,
- 30 untuk tercemar sedang, dan
- 10 untuk tercemar berat.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan Metode Indeks Pencemaran (*Pollution Index*) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.33
Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020

No	Titik Pemantauan	Lokasi	Nilai IP	Nilai IKA
1.	Sungai Cikopeng	Kedung Gede, Lumbir	2,77	80
2.	Sungai Canduk	Canduk, Lumbir	2,5	80
3.	Sungai Tajum Hulu	Cihonje, Gumelar	4,97	60



No	Titik Pemantauan	Lokasi	Nilai IP	Nilai IKA
4.	Sungai Arus	Legok, Pekuncen	6,39	40
5.	Sungai Tajum Tengah Cikakak	Cikakak, Wangon	2,94	80
6.	Sungai Tajum Tengah Gerduren	Gerduren, Purwojati	3,77	80
7.	Sungai Cibalung (Tajum Hilir)	Menganti, Rawalo	4,62	80
8.	Sungai Logawa Hulu	Baseh, Kedungbanteng	3,31	80
9.	Sungai Mengaji Hulu	Gunung Lurah, Cilongok	2,89	80
10.	Sungai Cangkok Hulu	Kalikesur, Kedungbanteng	3,84	80
11.	Sungai Prukut Hulu /Curug Cipendok	Karangtengah, Cilongok	2,46	80
12.	Sungai Banjaran Hulu	Ketenger, Baturraden	5,58	60
13.	Sungai Kranji Hulu	Rempoah, Baturraden	4,94	60
14.	Sungai Jengok Hulu	Kutaliman, Kedungbanteng	5,65	60
15.	Sungai Mengaji Tengah	Jipang, Karanglewas	6,48	40
16.	Bendung Andong Bang	Karangtengah, Cilongok	4,92	60
17.	Sungai Banjaran Tengah	Kedungwuluh, Purwokerto Barat	6,78	40
18.	Sungai Kranji Tengah	Kranji, Purwokerto Timur	6,96	20
19.	Sungai Jengok Tengah	Rejasari, Purwokerto Barat	7,45	20
20.	Sungai Logawa Tengah	Jipang, Karanglewas	7,04	20
21.	Sungai Banjaran Hilir	Sidabowa, Patikraja	4,89	60
22.	Sungai Telaga Sunyi	Limpakuwus, Sumbang	1,86	80
23.	Sungai Pelus Tengah	Dukuhwaluh, Kembaran	7,48	20
24.	Sungai Bener	Kranji, Purwokerto Timur	8,86	20
25.	Sungai Berem	Banjarsari Kidul, Sokaraja	6,08	40
26.	Sungai Tipar Hulu	Alas Malang, Kemranjen	3,95	80
27.	Sungai Tipar Tengah	Kecila, Kemranjen	4,69	60
28.	Sungai Cawang	Banjarpanepen, Sumpiuh	3,53	80
29.	Sungai Gumelar	Watu Agung, Tambak	5,54	60
30.	Sungai Sengon	Kebokura, Sumpiuh	3,86	80
RATA-RATA			4,9	59,33
NILAI INDEKS KUALITAS AIR (IKA)				59,33

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan, DLH, Banyumas, 2020

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dengan menggunakan metode indeks pencemaran, terlihat bahwa Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah 59,33 dengan kategori sedang. Nilai IKA Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dari nilai IKA Provinsi Jawa Tengah yaitu 51,64.



Gambar 3.12 pengambilan sample air untuk uji kualitas air

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kualitas udara ambien di Kabupaten Banyumas sangat dipengaruhi oleh kegiatan industry, perkantoran, pemukiman, dan transportasi. Dimana sumber pencemaran udara berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Beberapa polutan yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik, kegiatan di pemukiman, perkantoran, dan transportasi berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂, dan partikulat. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan jumlah industri, pertumbuhan jumlah pemukiman dan perkantoran yang berakibat pada peningkatan kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi, serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banyumas.

Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan terhadap udara ambient yaitu udara bebas di permukaan bumi yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual *passive sampler*. Parameter yang dipantau adalah NO₂ (*nitrogen dioxide*) dan SO₂ (*sulfur dioxide*). Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali setahun yang dianggap dapat mewakili kualitas udara pada musim hujan dan musin kemarau. Metode perhitungan IKU dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*.

Kategori dari nilai Indeks Kualitas Udara, dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu :



- $X > 90$ dengan kategori unggul
- $82 < x \leq 90$ dengan kategori sangat baik
- $74 < x \leq$ dengan kategori baik
- $66 \leq x \leq 74$ dengan kategori Cukup
- $58 \leq x < 66$ dengan kategori Kurang
- $50 \leq x < 66$ dengan kategori Sangat Kurang
- $X < 50$ dengan kategori Waspada

Hasil perhitungan dari pengukuran kualitas udara sebagai berikut :

Lokasi Sampling	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP I	TAHAP I	Rerata SO ₂ per lokasi	Rerata NO ₂ per lokasi
	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar NO ₂		
	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
Transportasi	4,85	2,47	15,9	11,2	3,66	13,55
Industri	15,84	12,35	14,9	13,6	14,10	14,25
Perkantoran	10,2	11,16	13,1	10,8	10,68	11,95
Pemukiman	7,21	6,24	8,8	7,1	6,73	7,95
BLANK		2,56		0,4		
Rerata SO ₂			$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$		8,79	
Rerata NO ₂				$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$		11,93
Indeks SO ₂			$(\text{Rerata SO}_2)/20$		0,44	
Indeks NO ₂				$(\text{Rerata NO}_2)/40$		0,30
Ieu (rerata Indeks)			$(\text{I NO}_2 + \text{I SO}_2)/2$		0,37	
IKU		$100 - (50/0.9 (\text{Ieu} - 0.1))$			85,07	

Sumber : UPT Laboratorium Lingkungan, DLH, Banyumas, 20120

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Banyumas adalah 85,07 dengan kategori sangat baik. IKU Kabupaten Banyumas masih di atas IKU provinsi Jawa Tengah dan IKU nasional dimana IKU Provinsi Jawa Tengah yaitu 84,81 sedangkan IKU nasional yaitu 84.



Gambar 3.13. Pemasangan *passive sampler*



3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng > 25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

Keterangan :

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TH = Tutupan Hutan

TH dihitung dengan rumus :



$$TH = \frac{LTH}{LWKP}$$

LTH = Luas Tutupan Hutan
LWKP = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

Luas tutupan hutan dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman;
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25% (dikalikan 0,6);
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati (dikalikan 0,6).

Koefisien 0,6 yang menjadi pengali tutupan lahan non hutan merupakan nilai yang didapat dari rata-rata nilai segmentasi citra penutupan lahan yang bukan hutan.

Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah 1.327,59 km² dikonversi seluas 132.759 hektar. Adapun hasil perhitungan Luas Tutupan Hutan (LTH) berdasarkan data tutupan lahan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34. hasil pengukuran Luas Tutupan Hutan (LHT)

No	Jenis Indeks Penyusunan IKTL	Hasil Pengukuran (Hektar)
1.	Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman	29.148,7626
2.	Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25%	2.320,07
3.	Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati	32.591,96
	Luas Tutupan Hutan (LTH)	64.060,8011

Sumber : DLH Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan nilai LTH diatas, maka didapat nilai Tutupan Hutan (TH) sebesar 0,482534526 sehingga hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan



Lahan (IKTL) adalah 66,81. Nilai IKLH Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi daripada IKTL Provinsi Jawa Tengah yaitu 50,08.

Berdasarkan perhitungan 3 (tiga) komponen yang menjadi komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka perhitungan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formulasi yang telah diterapkan secara nasional, yaitu :

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$$

Predikat nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dibedakan menjadi 6 predikat sebagai berikut :

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 < IKLH ≤ 60
5	Sangat Kurang Baik	40 < IKLH ≤ 50
6	Waspada	30 < IKLH ≤ 40

Sumber: IKLH Nasional 2018

Dengan rumus IKLH tersebut maka diperoleh perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 3.35
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Indeks Pengukuran	Hasil Pengukuran	Bobot	Nilai
IKA (Indeks Kualitas Air)	59,33	30%	17,799
IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,07	30%	25,52
IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	66,81	40%	26,72
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			70,04

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu **70,04**, terletak antara nilai 80 sampai dengan 80, sehingga disimpulkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2020 termasuk dalam kategori **BAIK**. Nilai IKLH tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKLH pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan metode perhitungan pada IKA dan IKTL.

Nilai IKLH Kabupaten Banyumas di atas nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah yaitu 60,97 dan nilai



Indeks Kualitas Lingkungan Nasional yaitu 66,55. Untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) maka yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Berdasarkan kategori kelas Indeks Pencemaran, kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Banyumas dalam kondisi tercemar ringan dan tercemar sedang, sehingga perlu pengambilan kebijakan untuk meningkatkan program pengendalian pencemaran air (diantaranya dengan meningkatkan kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik, industri, dll., peningkatan program ODF, STBM, dll.), serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari berbagai sektor yang terkait.
2. Nilai Indeks Pencemaran dengan status nilai IKA Sangat Berat terdapat pada 5 titik pantau yaitu Sungai Kranji Tengah Sungai Jengok Tengah, Sungai Logawa Tengah, Sungai Pelus Tengah dan Sungai Bener. Sungai-sungai tersebut perlu mendapatkan penanganan prioritas mengingat tingkat pencemarannya sudah sangat berat.
3. Indeks Kualitas Udara (IKU) perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan program-program pengendalian pencemaran udara dari berbagai pihak yang terkait serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas udara.
4. Perlu diusahakan di tahun yang akan datang untuk menambahkan parameter PM 2,5 pada perhitungan IKU sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 660.1/3038 tanggal 14 November 2019 perihal Penambahan Parameter PM 2,5 untuk Perhitungan IKU.
5. Perlu adanya pengelolaan tutupan hutan, peningkatan RTH (baik RTH Publik maupun RTH Privat) dan sinergisitas dari berbagai pihak terkait, baik oleh pemerintah, BUMN, LSM, dunia usaha maupun seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk mempertahankan kualitas tutupan lahan, sekaligus untuk menghindari menurunnya keanekaragaman hayati dan spesies di masa yang akan datang, serta untuk menyeimbangkan serapan emisi gas rumah kaca.
6. Perlu disusun suatu perencanaan yang terkoordinasi dan terpadu antar OPD teknis, termasuk dalam hal ini adalah pemutakhiran data dan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.



7. Perlu melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya ruang terbuka hijau dan lahan pertanian produktif agar tidak dikonversi untuk pengembangan fungsi selain lahan hijau dan produksi pangan.
8. Perlu komitmen semua pemangku kepentingan dalam penegakan regulasi tentang tata ruang dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Mengintensifkan frekuensi sosialisasi dan pembinaan berwawasan lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat.
10. Perlu melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati.
11. Meningkatkan anggaran terkait fungsi, pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup.
12. Peningkatan sarana dan prasarana yang berupa adanya laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi.
13. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, agar memiliki sertifikasi khusus terkait pengelolaan lingkungan.

Capaian kinerja tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.36 Realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	36.570.000	36.570.000	100
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	20.626.000	20.564.500	99.07
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.	11.062.100	11.062.100	100
4	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	180.286.600	163.895.100	90.91
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.	626.854.601	595.841.250	95.05
6	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST.	1.696.850.000	1.509.804.810	88.98



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.	32.757.000	31.527.828	96.25
8	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup.	555.900.000	553.087.792	99.49
9	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran.	875.727.500	802.028.889	91.58
10	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto.	6.642.468.747	5.841.726.383	87.95
11	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas.	777.013.250	703.340.049	90.52
12	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon.	941.840.900	876.445.072	93.06
13	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh.	856.280.000	803.152.871	93.08
14	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang.	1.078.965.000	1.040.164.508	96.04
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	7.715.520.783	7.343.304.533	95.18
16	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	224.555.300	224.552.600	100
17	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	80.925.400	80.618.900	99.62
18	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	3.887.873.616	3.378.953.764	86.91
19	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	180.286.600	31.527.828	96.25

**Tujuan 7 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat.**

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan satu indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Indeks daya Saing Infrastruktur	Indeks	80,01	67,38	84,21

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.39

Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Indeks daya Saing Infrastruktur	Indeks	70,88	65,48	67,38	82,56	81,61

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

Indeks Daya Saing Infrastruktur

Indeks Daya Saing infrastruktur merupakan suatu indeks yang menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan capaian dari masing-masing komponen. Indeks Daya Saing Infrastruktur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu dari sebesar 50,977% menjadi 60,443%, Sedangkan pada



tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 30,28% dan mengalami kenaikan lagi menjadi 34,96% di tahun 2017. Hal ini didasarkan pada penambahan ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Berdasarkan SK tersebut panjang jaringan jalan Kabupaten Banyumas mulai tahun 2016 menjadi 1.508 km dari sebelumnya 804,784 km. Sebagian besar penambahan ruas jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antar desa yang kondisinya sebagian besar rusak. Pada tahun 2020 panjang jalan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40. Kondisi jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Kondisi	Panjang	%	Kondisi		
Baik	679,15	45,04	1.027,	68,13	Mantap
Sedang	348,31	23,10			
Rusak ringan	460,04	30,51	480,54	31,87	Tidak mantap
Rusak berat	20,50	1,36			
Jumlah	1.508,00	100,00	1.508,00	100,00	

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2020.

Berdasarkan data di atas, tahun 2020 kondisi panjang jalan dalam keadaan baik menjadi 45,04 %, sementara yang sedang sebesar 23,10%, sehingga kondisi panjang jalan dalam kondisi mantap menjadi sebesar 68,13%. Secara rinci capaian kinerja panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap
Dari Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Panjang jalan kabupaten	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	30,25	34,96	35,47	35,47	45,04
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	21,46	20,95	23,53	23,83	23,10
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (%)	29,57	27,63	22,09	19,39	30,51
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (%)	18,72	16,46	18,92	16,91	1,36

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas , 2020.



Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, peningkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantapan kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.



Gambar 3.14 Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Jalan Tugu - Pasar Bangsa, Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen

Persentase rumah tinggal pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan permukiman, meliputi rumah dan perumahan, peningkatan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi. Di samping permasalahan ketersediaan perumahan Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. Dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih meningkat namun capaiannya baru mencapai sebesar 74,22% pada tahun 2020. Cakupan rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 88,45%. Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih rendah dari target *universal access* sebesar 100%. Mulai tahun 2018-2020 cakupan sanitasi menggunakan data STBM (Kemenkes) sehingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan Selengkapnya capaian perkembangan kinerja adalah sebagai berikut :



Tabel 3.42
Perkembangan Kinerja Jumlah Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	303.139	311.139	322.466	331.360	334.674	337.553
2.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	67,97	68,91	70,54	72,67	73,71	74,22
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	66,72	67,96	75,33	82,88	87,79	88,45

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas , 2020.

Berdasarkan target *universal access* 100-0-100 sesuai dengan RPJMN 2020-2025 mengamanatkan bahwa di tahun 2020 seluruh masyarakat harus memiliki akses air minum dan sanitasi layak, terlebih pada tahun tersebut Indonesia telah menargetkan untuk menjadi *middle income country* yaitu negara berpenghasilan menengah.

Secara umum terdapat gap yang cukup besar antara target indikator kinerja terkait pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh dalam RPJMD Kabupaten Banyumas dengan target *universal access* 100-0-100 dikarenakan target dalam RPJMD Kabupaten Banyumas telah disusun lebih dahulu sebelum RPJMN 2020-2025 dan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Lebih lanjut pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh tidak hanya untuk memenuhi target *universal access* tetapi juga untuk memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's.



Gambar 3.15 Wakil Bupati Banyumas meresmikan program RTLH di Desa Randegan Kecamatan Wangon

Sarana Perhubungan (Terminal)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SK Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C, di Banyumas terdapat infrastruktur perhubungan darat yang terdiri dari 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Pembangunan terminal khususnya Tipe C terus dilakukan untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya. Kebutuhan terminal yang ada di Kabupaten Banyumas sejumlah 8 unit, namun baru terealisasi sebanyak 3 unit, atau capainnya mencapai 37,5%. Adapun fasilitas terminal yang ada di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43

Fasilitas Terminal di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Lokasi
1.	Jumlah Terminal Kelas A (unit)	1	Purwokerto
2.	Jumlah Terminal Kelas B (unit)	-	-
3.	Jumlah Terminal Kelas C (unit)	2	Wangon, Ajibarang



Gambar 3.16 Terminal Bulu Pitu Purwokerto

Capaian kinerja meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.44. Realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan.	34.840.342.091	32.546.969.916	93.42



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
2	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan.	7.615.359.879	7.092.430.589	93.13
3	Program Pengembangan Kawasan Permukiman.	8.605.477.778	8.175.286.550	95
4	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	776.450.000	737.781.500	95.02
5	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan.	11.466.544.000	11.250.404.825	98.12
6	Program Peningkatan Perencanaan Teknis .	2.810.248.431	2.743.593.716	97.63
7	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.	545.000	545.000	100
8	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung.	263.688.794	195.630.044	74.19
9	Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan.	450.800.000	439.386.750	97.47
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	28.746.634.752	22.715.919.832	79.02
11	Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan.	14.905.000.000	14.745.726.140	98.93
12	Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan.	1.845.994.547	1.762.650.389	95.49
13	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.	11.900.579.334	11.776.441.322	98.96
14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi.	63.589.160	54.728.600	86.07
15	Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong.	1.792.500.000	1.770.462.500	98.77
16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase.	650.000.000	647.209.250	99.57



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
17	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	1.342.895.754	1.275.391.000	94.97
18	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	1.045.284.280	978.907.146	93.65
19	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	8.066.494.180	7.955.742.649	98.63
20	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan.	1.231.501.000	1.203.566.344	97.73
21	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	689.499.630	637.827.565	92.51
22	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan.	104.462.553.122	103.040.540.136	98.64
23	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	2.761.136.450	2.601.611.461	94.22
24	Program Pengembangan Perumahan.	442.134.729	313.289.717	70.86
25	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.	12.455.890	6.132.770	49.24

Permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur yang optimal membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar.
2. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dalam pembangunan sektor infrastruktur antara lain pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa.
3. Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi penduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar

menjadi semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi :

- a. Perlu dikembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastuktur melalui KPBU dan CSR.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bersifat konkuren.
- c. Pembangunan infrastruktur terutama dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik lebih diprioritaskan.



Gambar 3.17 Bupati Banyumas Achmad Husein melakukan uji coba pengaspalan hotmix berbahan baku campuran plastik kresek di Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas

Tujuan 8 : Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi , maka ditetapkan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	5.86	-61,85	-1.055,46



Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	5	5,65	113
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,23	6	58,16

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.46
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	11,91	51,53	-61,85	48,48	0
Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	NA	0	5,65	15	37,07
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,49	4,21	6	3,76	159,57

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)

Kinerja makro urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, dan umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya.

Di samping obyek wisata tersebut Kabupaten Banyumas juga memiliki berbagai potensi pariwisata yang belum dikembangkan antara lain: wisata edukasi geologi di Kawasan Wisata Baturraden, wisata alam air terjun /curug di beberapa kecamatan, wisata budaya dan heritage di Kawasan Kota Lama Banyumas, wisata alam Sungai Serayu. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banyumas.

Pada tahun 2020 ini, kota lama Banyumas direkomendasikan menjadi kawasan cagar budaya, karena Kecamatan Banyumas merupakan kawasan yang bersejarah dan masih meninggalkan ratusan bangunan maupun arsitektur



dengan tata ruang yang memiliki karakter tersendiri, dimana dari hasil inventarisasi ditemukan 104 bangunan dan arsitektur peninggalan sejarah yang sebagian kecil bangunan sudah terdaftar sebagai cagar budaya peringkat nasional maupun kabupaten.

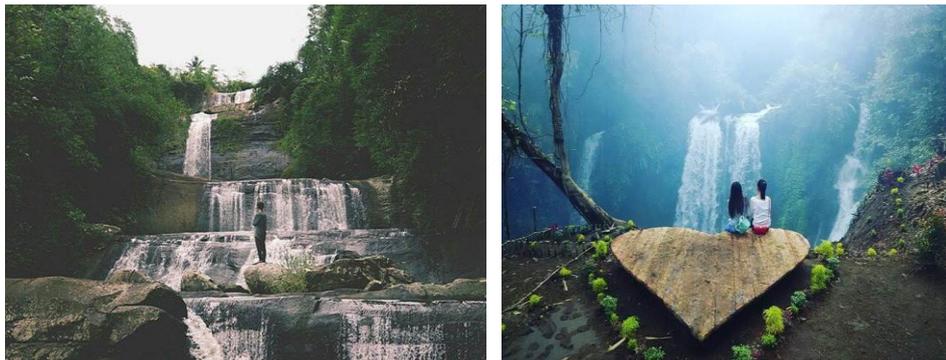
Infrastruktur pendukung pariwisata seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Obyek wisata di Kabupaten Banyumas berkembang dengan pesat, dari sebanyak 20 obyek di tahun 2018 menjadi 51 obyek di tahun 2020. Adapun data obyek wisata sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Taman Rekreasi Andhang | 27. Kph.T.C.Cipendok |
| Pangrenan | 28. Kph.T.C.Gomblang |
| 2. Taman Balai Kamambang | 29. Kph.T.klpgu.Jenggala |
| 3. THR Pangsar Sudirman | 30. Kph.T.b.p.Munggang |
| 4. Kalibacin | 31. Kph.T.C.Bayan |
| 5. Baturraden | 32. Kph.T.Limpakuwus |
| 6. Dreamland | 33. Kph.T.C.song |
| 7. Palawi Wanawisata | 34. Kph wana pramuka |
| 8. Palawi P3 | 35. Kph. T. Kumpe |
| 9. Palawi P7 | 36. Outbond candi |
| 10. Palawi Telaga Sunyi | 37. G.W.Karangmangu |
| 11. Small World | 38. Curug Nangga |
| 12. Curug Telu Karangsalam | 39. Watu kumpul |
| 13. The Forest | 40. Wisata Germanggis |
| 14. Caping Park | 41. K.R Karang Tirta |
| 15. The Village | 42. Prawita garden |
| 16. Pereng | 43. Taman Otcha |
| 17. M. Sendang Mas | 44. Kaliung |
| 18. Watugede, Kalisalak | 45. Pertapan Gerduren |
| 19. Wadas Tumpang | 46. Greenstone karangsalam |
| 20. MSTB Cikakak | 47. C.A.U.B Karangsalam |
| 21. Batu Jonggol | 48. Gn Laos |
| 22. Bukit Kendalisada | 49. Paguyuban Melung |
| 23. Bumper Kendalisada | 50. K.R. Sentana |
| 24. Curug Gemawang | 51. Lorong Blothong |

25. KphB.C Wanasuta
26. KphT. Watu Meja



Gambar 3.18 Wisata *off road* kawasan kaki Gunung Slamet Baturraden



Gambar 3.19 wisata curug di Banyumas (Curug Nangga dan Curug Jenggala)

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mendukung pencapaian indikator urusan pariwisata melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 8 (delapan) dan pada tahun 2020 bertambah 7 desa sehingga menjadi 15 (limabelas) desa dari 301 desa yang ada. Pengembangan desa wisata sangat potensial untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Upaya ini telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di



Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan fluktuatif, dengan kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden. Namun dengan adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 ini, terjadi penurunan secara drastis bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas.

Perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.47
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas
Tahun 2015 - 2020

Uraian	Satuan	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Jumlah Kunjungan wisata	orang	1.784.378	2.013.992	2.111.865	2.363.002	3.580.743	1.866.157
a. Wisatawan Nusantara	orang	1.784.018	2.013.544	2.111.367	2.111.367	3.580.485	1.866.083
b. Wisatawan Mancanegara	orang	360	448	498	498	258	74

Sumber : Dinporabudpar, 2020

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisata tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah wisatawan tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis sebanyak 61,85% dari 3.580.743 kunjungan wisata pada tahun 2019 menjadi 1.866.157 kunjungan wisata ditahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang berdampak bagi sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas. Penurunan kunjungan wisata disebabkan antara lain :

1. Adanya penutupan seluruh obyek wisata di Kabupaten Banyumas karena covid-19 mulai triwulan II tahun 2020.
2. Tidak adanya event wisata maupun budaya karena ada pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah pusat.
3. Adanya Surat Edaran Bupati Banyumas tentang pembatasan jumlah kunjungan dibawah 50% dari kapasitas dan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas menerapkan kunjungan rata-rata 40%.

Dalam rangka meningkatkan pariwisata dan jumlah wisawatan serta obyek wisata di masa pandemi covid-19, hal-hal yang dilaksanakan antara lain:

1. Pembebasan pajak hotel dan restoran .
2. Pengurangan biaya/tarif masuk ke lokasi pariwisata.
3. Memasarkan destinasi wisata di Kabupaten Banyumas baik melalui media cetak dan online.



4. Meningkatkan paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalannya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya.
5. Meningkatkan potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage sehingga mendorong perkembangan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Banyumas.
6. Mengembangkan produk wisata non fisik sebagai pendukung, antara lain meliputi kerajinan, kuliner, dan produk-produk kreatif lainnya.

Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif

Dewasa ini, ekonomi berkembang tidak hanya melalui sektor yang besar seperti manufaktur, namun sudah jauh bergerak ke ranah yang lebih luas. Lebih jauh, sumber daya manusia yang termasuk di dalamnya ide dan gagasan kreatif berkembang dan digunakan untuk menciptakan suatu produk yang dapat memiliki nilai tambah yang tinggi.

Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya, tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Kreatifitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

Industri kreatif di Kabupaten Banyumas mulai ditargetkan pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 baru dilaksanakan langkah-langkah agar industri kreatif di Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan dan jumlah industri kreatif semakin berkembang di tahun 2020. Adapun data industri kreatif yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.141 meningkat 61 buah dibandingkan tahun 2019, dengan jumlah industri kreatif sebagai berikut :

Tabel. 3.48
Data Industri Kreatif di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Industri Kreatif	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Advertising	-	7
2.	Jasa arsitektur	-	-
3.	Kerajinan craft	950	981
4.	Desain (grafis, interior, dsb)	-	-
5.	Pakaian / fasion	6	35



No	Jenis Industri Kreatif	Tahun 2019	Tahun 2020
6.	Video/film/fotografi	100	100
7.	Permainan interaktif	-	-
8.	Musik	-	-
9.	Penerbitan dan percetakan	14	8
10.	Layanan komputer	10	10
	Jumlah	1.080	1.141

Sumber : Dinperindag, data diolah 2020

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan prinsip pengembangan ekonomi kreatif dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 meliputi :

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
- b. Peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi.
- c. Penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan, serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan dunia.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif, langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

1. Peningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku industri kreatif, dengan melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pengembangan industri kreatif.
2. Peningkatan penggunaan teknologi dalam mengembangkan industri kreatif.
3. Fasilitasi event-event pameran, baik tingkat provinsi dan nasional dalam rangka pemasaran produk dan menumbuhkan pangsa pasar bagi industri kreatif.



Gambar 3.20
Wakil Bupati Banyumas membuka pameran UMKM
di Pendopo Wakil Bupati Banyumas

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) memberi indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Banyumas Tahun 2020 tercatat 6 % yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 naik 1,84% dibandingkan tahun 2019 dimana TPT nya tercatat 4,17%. Penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 antara lain :

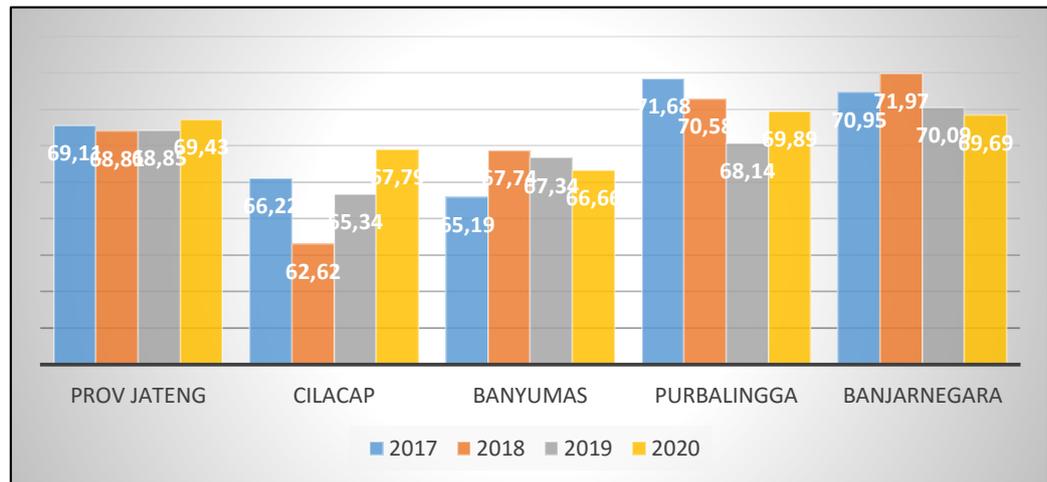
1. Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .
2. Berkurangnya kesempatan kerja (lowongan kerja berkurang) sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor formal sangat kurang sedangkan angkatan kerja semakin bertambah.
3. Penempatan hasil job fair 2020 sebagian besar ditunda/dibatalkan karena perusahaan terdampak covid-19.
4. Dari bulan Maret hingga September 2020, penempatan pekerja migran Indonesia ditutup dan bulan September 2020 telah dibuka kembali tetapi hanya untuk beberapa negara dan job tertentu saja.

Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Banyumas tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019, karena belum rilis dari BPS, dimana Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Banyumas sebesar 868.553 orang. Angkatan Kerja (AK) dihitung berdasarkan jumlah orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Sementara untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2020



sebesar 66,66%. Adapun capaian apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lain adalah sebagai berikut :

Grafik 3.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga Tahun 2017 - 2020



Sumber : BPS Propinsi Jateng tahun 2020

Sementara untuk jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 – 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.49
Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 - 2019

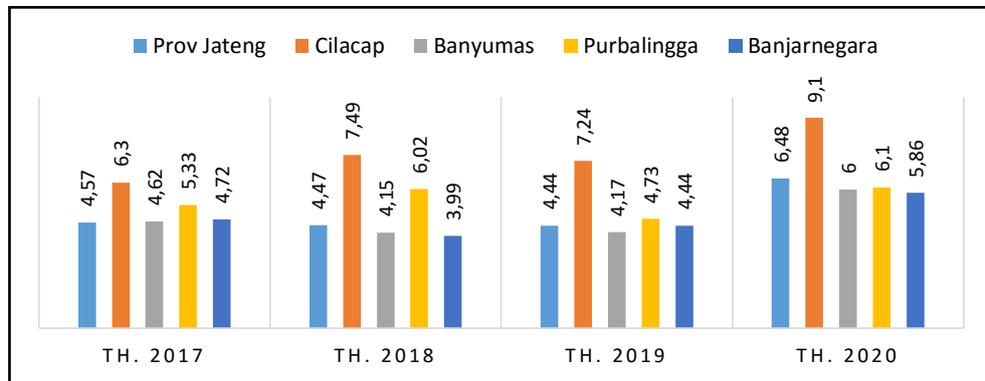
Wilayah	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angk. Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prov Jateng	17.186.674	823.938	18.010.612	17.245.548	814.347	18.059.895	17.441.153	819.355	18.260.508
Cilacap	788.414	52.992	841.406	739.602	59.801	799.403	780.198	61.491	841.689
Banyumas	785.231	38.048	823.279	827.086	36.138	863.224	832.017	36.536	868.553
Purbalingga	463.809	26.138	489.947	457.918	29.522	487.440	454.098	22.798	476.896
Banjarnegara	464.432	23.025	487.457	478.171	19.915	498.086	467.345	21.876	489.221

Sumber : BPS Propinsi Jateng , 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.12
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah,
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 - 2020



Sumber : BPS Propinsi Jateng , 2020

Sebagai dampak pandemi Covid-19, di Kabupaten Banyumas terjadi Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 324 orang, pekerja yang dirumahkan sebanyak 2.388 orang dan jumlah pengangguran tahun 2020 naik sebanyak 7.761 orang menjadi 45.683 orang dibanding tahun 2019 sebanyak 37.922 orang (data Dinsosnakertrans 2020). Dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran terbuka, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang sesuai dengan kemampuan kebanyakan masyarakat tersebut ditambah dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu diberikan modal yang akan digunakan untuk menunjang usaha tersebut.
2. Memperluas kesempatan kerja dengan cara memanfaatkan usaha-usaha yang mampu menyerap pekerja yang banyak/padat karya.
3. Mempermudah ijin usaha, terutama UMKM yang saat ini masih sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat.
4. Melatih para pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja sendiri/wirasawasta sehingga tidak bergantung pada pengguna tenaga kerja.
5. Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan kemasyarakatan.
6. Memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagai motivasi para pencari kerja untuk mengetahui pekerjaan atau usaha sesuai dengan bakat minatnya.



7. Melaksanakan pameran kesempatan kerja (*Job Fair*).
8. Mencari peluang kerja /kesempatan kerja baik di Kabupaten Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas.
9. Penguatan lembaga penempatan baik di dalam maupun di luar negeri.

Capaian kinerja menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.50. Realisasi anggaran progra

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.	5.145.453.620	3.460.181.532	67.25
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	165.491.673	147.826.423	89.33
3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	44.339.188	44.339.188	100
4	Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang .	84.020.000	59.832.000	71.21
5	Program Kajian Strategis Daerah.	402.102.169	362.415.780	90.13
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	495.594.701	408.516.946	82.43
7	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	539.349.835	462.916.569	85.83
8	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.	78.156.074	76.877.423	98.36
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	424.843.763	433.662.134	91.95
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.	35.750.876	30.165.876	84.38
11	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	107.656.457	19.121.075	95.61
12	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	1.160.802.000	107.634.940	99.98
13	Program Peningkatan Kesempatan kerja.	193.463.576	875.623.052	75.43



Tujuan 9 : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, maka ditetapkan 4 (empat) indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 3.51
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	5	7,14	142,80
Angka Kriminalitas	kasus	792	727	108,21
Indeks Demokrasi	indeks	79,3	77,22	97,38
Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	47,47	46,30	97,54

Adapun realisasi indikator kinerja terhadap target RPJMD tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.52
Capaian Kinerja terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian %
Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	NA	6,6	7,14	25	26,40
Angka Kriminalitas	kasus	677	831	727	950	112,53
Indeks Demokrasi	indeks	74.46	72,12	77,22	86	83,86
Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	NA	32,87	46,30	100	32,87

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

Persentase Penurunan Konflik Sosial

Pengertian dari konflik sosial dapat diartikan sebagai perubahan sikap dalam masyarakat yang mengakibatkan pada terkikisnya kesatuan (integrasi) social. Konflik ini tidak hanya datang dari dalam masyarakat, tetapi dapat juga dari luar masyarakat oleh karenanya banyak yang mengatakan bahwa konflik social adalah salah satu faktor pendorong perubahan social. Konflik sosial yang



terjadi di masyarakat meliputi konflik SARA dan konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Adapun penurunan angka konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 7,14% dari target sebesar 5% sehingga capaiannya adalah 125%. Angka konflik SARA dan angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM yang terjadi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 semakin menurun, sehingga mengindikasikan semakin baiknya kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Kabupaten Banyumas. Adapun angka konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53
Angka konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM
di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka konflik SARA	10 kasus	7 kasus	142 %	22 kasus	2 kasus	190,91%	18	1	188,89%
2.	Angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	12 kasus	8 kasus	150 %	14 kasus	12 kasus	114,29%	12	12	100%
Rata-rata capaian				146 %		152,6 %				144,44%

Sumber : Bakesbangpol, 2020

Pengendalian suatu konflik hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai pihak yang berkonflik terorganisir secara jelas. Menekan sebuah konflik agar tidak berlanjut menjadi sebuah tindak kekerasan memerlukan strategi pendekatan yang tepat. Dalam rangka pengendalian konflik, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah diantaranya meliputi :

1. Melakukan konsiliasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik sosial melalui lembaga-lembaga tertentu misalnya lembaga perwakilan rakyat (DPRD) yang dapat memberikan keputusan yang adil. Dalam konsiliasi berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan.
2. Melakukan Arbitrasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik social melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik menyetujuinya. Keputusan-keputusan yang diambil pihak ketiga harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

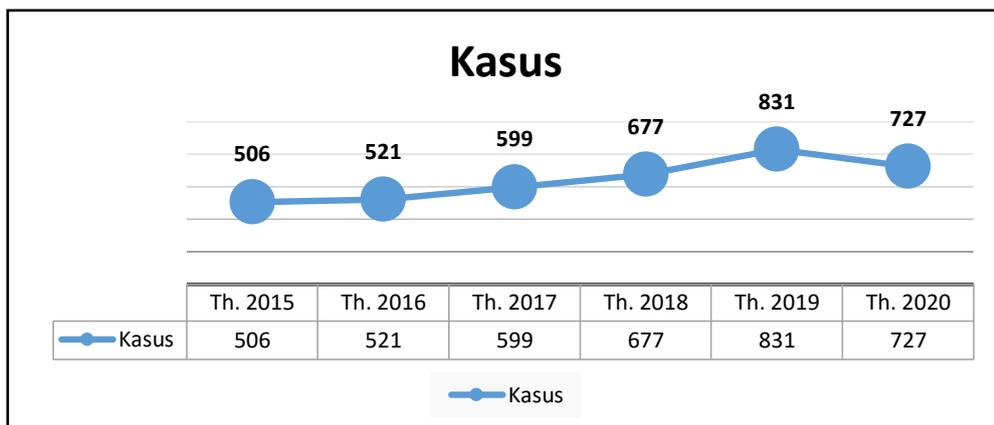


3. Melakukan Mediasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik sosial dimana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

Angka Kriminalitas

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu aspek pendukung iklim berinvestasi. Keamanan wilayah tercermin dari Angka kriminalitas yaitu banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 831 kasus, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 727 kasus. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas selama tahun 2015-2020 adalah terlihat pada tabel berikut:

Grafik. 3.13
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kabupaten Banyumas Tahun 2015– 2020



Sumber : Bakesbang Kab. Banyumas, 2020

Dalam rangka menurunkan angka kriminalitas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah :

1. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar antara lain dengan menggalakkan ronda malam (siskamling) dan pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling).
2. Meningkatkan peran serta pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
3. Memberlakukan aturan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.



4. Menumbuhkan kerja sama yang solid antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan preventif.

Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Masing-masing ketiga aspek tersebut memiliki variabel yang berjumlah 11 yaitu :

- A. Kebebasan Sipil, terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu :
 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat
 2. Kebebasan berpendapat
 3. Kebebasan berkeyakinan
 4. Kebebasan dari diskriminasi
- B. Hak-hak politik, terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu :
 1. Hak memilih dan dipilih
 2. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan
 3. Pemilu yang bebas dan adil
 4. Peran DPRD
- C. Lembaga demokrasi, terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu :
 1. Peran Partai Politik
 2. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
 3. Peradilan yang independen

Metodologi penghitungan indeks demokrasi menggunakan 4 (empat) sumber data yaitu Review surat kabar lokal, Review dokumen (perda, perbup dan lain-lain), *Focus Group Discussion* FGD), Wawancara mendalam. Sementara klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni:

1. Baik (indeks>80).
2. sedang (indeks 60-80) .
3. buruk (indeks<60).

Indeks Demokrasi tahun 2020 masih mengacu pada Indeks Demokrasi tahun 2019 karena nilai indeks tahun 2020 belum rilis, dimana nilai indeks demokrasi berdasarkan nilai indeks demokrasi Provinsi Jawa Tengah. Nilai indeks pada tahun 2020 adalah 77,22 naik 5,1 dibandingkan tahun 2019 dimana indeks



demokrasinya di angka 72,12, termasuk dalam kategori “Sedang”. Nilai Indeks Demokrasi masih di atas indeks demokrasi nasional sebesar 74,92.

Dalam rangka meningkatkan nilai indeks demokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan langkah-langkah diantaranya dengan :

1. Tranparansi anggaran (APBD) dalam berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti website pemerintah dan sebagainya.
2. Membuat “Lapak Aduan” yang disediakan oleh Pemerintah dalam menggali aduan/usulan/pendapat masyarakat.
3. Mengurangi tingkat kekerasan/kerusakan dalam demonstrasi (unjuk rasa oleh masyarakat) baik kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat pelaku demonstrasi.
4. Mengurangi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk operasional partai politik.
5. Meningkatkan peran serta dari unsur masyarakat, akademisi, aktivis, LSM dan pekerja media yang juga aktif .

Persentase Pelestarian Budaya Banyumas

Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya.

Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun. Penyelenggaraan festival seni dan budaya antara lain menampilkan pagelaran kesenian buncis karawitan, calung dan macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, namun



kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival perlu dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival. Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya.

Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekspresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Hingga tahun 2020 tercatat 60 benda bersejarah, berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi. Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 10.079 jumlah kelompok.

Adapun persentase pelestarian budaya meliputi persentase pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sebesar 36 % ditambah dengan persentase jenis kesenian yang ada sebesar 56,60 %, sehingga total persentase rata-rata pelestarian budaya banyumas sebesar 46,30 %. Adapun gambaran pelestarian budaya dapat dilihat pada capaian indikator sebagai berikut :

Tabel. 3.54
Capaian Kinerja Pelestarian Budaya Banyumas dari Tahun 2015-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja					
		Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020
1.	Penyelenggaraan budaya festival seni dan budaya (kali)	9	5	24	24	200	30
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	5	6	6	6	6	6
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	59	59	59	60
4.	Jumlah grup kesenian (kelompok)	1.633	1.633	1.633	1.633	1.717	10.079
5.	Jumlah grup kesenian yang telah dibina (kelompok)	135	157	157	157	200	201
6.	Jumlah seniman (orang)						
	- Penari	1.529	1.529	1.529	1.529	8.250	8.525
	- Pemain Teater	900	900	900	900	7.400	7.405
	- Pelukis	112	112	112	112	112	112
	- Pemusik	5.983	5.983	5.983	5.983	6.300	6.300

Sumber : Dinporabudpar, 2020

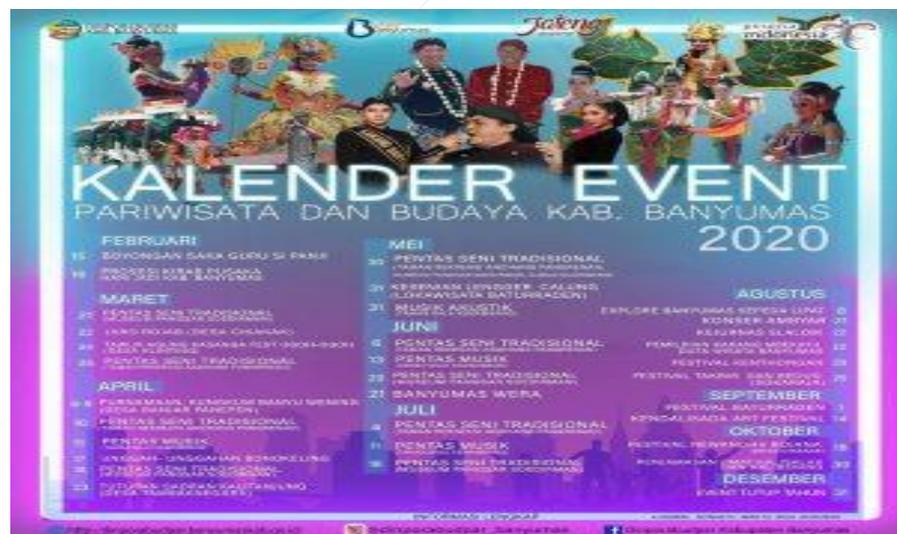


Permasalahan yang terjadi terkait dengan pertumbuhan kelompok seni dan budaya tradisional, diantaranya karena masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing ke suatu Negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa.

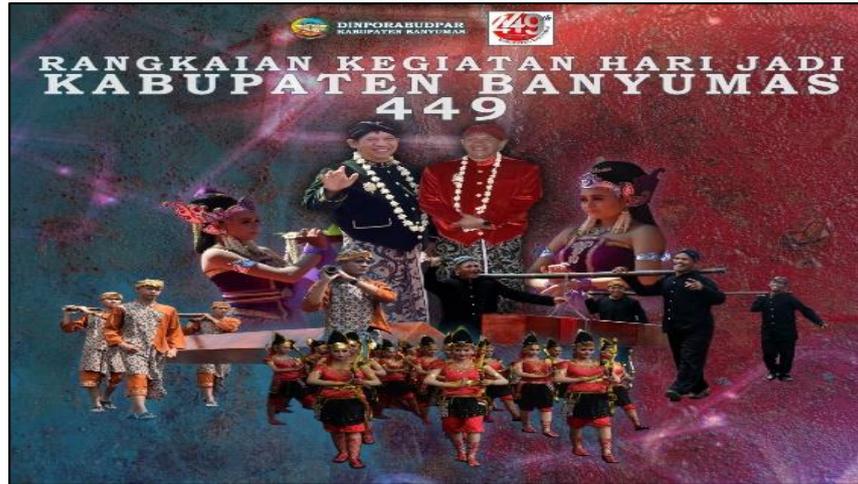


Namun pada kenyataannya budaya asing mulai mendominasi sehingga budaya lokal mulai dilupakan. Faktor lain yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan dari budaya lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tugas utama yang perlu dibenahi adalah bagaimana mempertahankan, melestarikan, menjaga serta mewarisi budaya lokal dengan sebaik-baiknya agar dapat memperkokoh budaya bangsa yang akan mengharumkan nama daerah, dan agar budaya asli daerah tidak diklaim oleh daerah yang lain.



Gambar 3.21 Kalender event festival dan budaya 2020



Gambar 3.22 Festival Budaya Kabupaten Banyumas 2020

Capaian kinerja Meningkatkan aktualisasi nilai nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.55 Realisasi anggaran program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	776.385.371	753.160.727	97.01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.	116.822.000	116.822.000	100
3	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.	98.000.000	92.849.350	94.74
4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.	78.499.860	70.690.110	90.05
5	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.	1.584.433.729	1.464.676.487	92.44
6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.	1.538.248.500	1.280.580.597	83.25
7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	813.684.781	735.827.593	90.43
8	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	1.463.363.037	1.133.124.789	77.43
9	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum.	307.957.000	156.880.686	50.94
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	87.160.000	81.229.500	93.02



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
11	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat.	1.317.399.000	1.263.563.960	95.91
12	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan.	188.037.000	163.223.000	86.08
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.	1.060.083.582	1.016.535.631	95.89
14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.	1.108.856.307	909.239.037	82

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.56 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Sebelum Audit BPK RI)

No	Uraian	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Realisasi
1.	Pendapatan Daerah	3.568.568.763.744	3.340.277.876.851	3.251.478.811.669
1.1	Pendapatan Asli Daerah	729.892.819.015	633.302.968.814	668.294.648.166
1.2	Dana Perimbangan	2.046.987.459.669	1.875.995.975.977	1.854.294.495.150
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	791.688.485.060	830.978.932.060	728.889.668.353
2.	Belanja Daerah	3.743.918.763.744	3.556.833.000.332	3.249.164.467.885
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.209.349.806.320	2.152.818.084.688	1.976.899.786.087
2.2	Belanja Langsung	1.534.568.957.424	1.404.014.915.644	1.272.264.681.798
3.	Pembiayaan Daerah	175.350.000.000	216.555.123.481	213.185.623.481
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	205.000.000.000	247.705.123.481	242.705.123.481
3.1.1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	200.000.000.000	242.705.123.481	242.705.123.481
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.000.000.000	5.000.000.000	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.650.000.000	31.150.000.000	29.519.500.000
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	28.150.000.000	28.150.000.000	28.150.000.000



No	Uraian	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Realisasi
3.7	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0
3.8	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0	215.499.967.265

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas,2020

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2020

NO	TUJUAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	105.788.277.889	92.587.114.976	87,52
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	837.051.570.000	698.532.734.355	83,45
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	15.406.593.664	9.962.746.360	64,67
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	21.583.641.305	15.006.533.892	69,53
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	952.141.835	950.716.853	99,85
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	26.242.076.797	24.016.640.949	91,52
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	246.787.708.801	234.668.175.711	95,09



NO	TUJUAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	8.943.823.932	6.679.102.417	74,68
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	10.538.930.167	9.238.403.467	87,66
JUMLAH		1.273.294.764.390	1.091.642.168.980	85,73

ANALISIS EFEKTIVITAS

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.58
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	MISI 1 . Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat				
1.	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	101,12	92.587.114.976	87,52
	MISI 2 . Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok				
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	99,21	698.532.734.355	83,45
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	4	82,86	9.962.746.360	64,67
	MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan				



No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	51,34	15.006.533.892	69,53
MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan					
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	107,11	950.716.853	99,85
MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan					
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	2	1.093,07	24.016.640.949	91,52
MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan					
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	84,21	234.668.175.711	95,09
MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal					
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	3	57,05	6.679.102.417	74,68



No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious					
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	4	111,48	9.238.403.467	87,66

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

ANALISI EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 9 tujuan/sasaran strategis, 5 (lima) tujuan/sasaran strategis sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.59

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
MISI 1 . Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat					
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	101,12	87,52	13,6



No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
MISI 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok					
2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	99,21	83,45	-
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	4	82,86	64,67	-
MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan					
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	51,34	69,53	-
MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan					
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	107,11	99,85	7,26
MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan					
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	2	1.093,07	91,52	1.001,55
MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan					
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	84,21	95,09	-
MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal					



No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	3	57,05	74,68	-
MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius					
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	4	111,48	87,66	23,82

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas diketahui bahwa terdapat 5 (lima) tujuan/sasaran strategis memperoleh hasil persentase rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi persentase anggaran, sedangkan 4 (empat) tujuan/sasaran strategis masih kurang efisien, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya tertinggi dicapai pada tujuan ke 6 (enam) yaitu Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dimana realisasi anggaran sebesar 91,52% dapat mencapai prosentase capaian kinerja sebesar 1.093,07%. Efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 didukung oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Dilakukan upaya persuasif kepada para para investor sehingga mereka yang belum melaporkan nilai investasinya bersedia melaporkannya kepada DPMPTSP.
 - 2) Dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP), menyebabkan perizinan menjadi cepat, sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.
 - 3) Untuk investor dengan perizinan yang kurang lengkap dapat segera dilayani di Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga menopang peningkatan realisasi investasi.
 - 4) Dukungan dan peran serta pihak swasta terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak juga terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 paling rendah pada tujuan ke-3 , dimana



dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB dan Nilai Tukar Petani , realisasi persentase pertumbuhan PDRB minus 1,65, sedangkan pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 6.32%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan negatif di tingkat nasional dan propinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

c. Pada tujuan ke-8 (delapan) yaitu Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana prosentase realisasi anggaran sebesar 74,68% sedangkan prosentase rata-rata capaian kinerja sebesar 57,05%. Rendahkan efisiensi pada tujuan ke 8 (delapan) disebabkan oleh antara lain:

- 1) Adanya penutupan seluruh obyek wisata di Kabupaten Banyumas karena covid-19 mulai triwulan II tahun 2020.
- 2) Tidak adanya event wisata maupun budaya karena ada pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah pusat.
- 3) Adanya Surat Edaran Bupati Banyumas tentang pembatasan jumlah kunjungan dibawah 50% dari kapasitas dan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas menerapkan kunjungan rata-rata 40%.
- 4) Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .
- 5) Berkurangnya kesempatan kerja (lowongan kerja berkurang) sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor formal sangat kurang sedangkan angkatan kerja semakin bertambah.
- 6) Penempatan hasil job fair 2020 sebagian besar ditunda/dibatalkan karena perusahaan terdampak covid-19.
- 7) Dari bulan Maret hingga September 2020, penempatan pekerja migran Indonesia ditutup dan bulan September 2020 telah dibuka kembali tetapi hanya untuk beberapa negara dan job tertentu saja.

Analisis program yang mendukung pencapaian target kinerja

a. Keberhasilan pencapaian kinerja tertinggi salah satunya dukungan program dan kegiatan. Dalam urusan investasi, didukung oleh program peningkatan iklim invenstasi dan realisasi investasi, program peningkatan promosi dan kerjsama investasi, program potensi sumber daya, sarana dan prasaran daerah. Dengan adanya program-program tersebut, maka kegiatan untuk menggalakkan investasi dan promosi pengembangan investasi dengan menggandeng sektor swasta dapat terlaksana.



- b. Program lain yang mendukung capaian kinerja yaitu Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program pengelolaan ruang terbuka hijau, dimana dengan program-program tersebut maka Kabupaten Banyumas dapat menjaga kondisi lingkungan hidup agar sesuai dengan baku mutu yang ditentukan.

PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

- a. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebanyak 149 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 184,792,473,552.72. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa setelah dilakukan negosiasi didapat nilai kontrak sebesar Rp 171,177,110,091.40, sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang jasa sebesar Rp 13,615,363,461.32 atau sebesar 7,37 % dari total HPS.

HPS	Realisasi	Selisih	Efisiensi %
184,792,473,552.72	171,177,110,091.40	13,615,363,461.32	7,37

- b. Pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilakukan pengadaan dengan *e-Purchasing*. Pada tahun 2020 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah melakukan pengadaan barang / jasa melalui *e-Purchasing* sebanyak 198 paket dengan total rencana pengadaan sebesar Rp 60.307.577.137,00 dan realisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* setelah dilakukan negosiasi turun menjadi Rp 57.624.587.899,00 sehingga terdapat efisiensi pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* Rp 2.682.989.238,00 atau sebesar 4,45% .

HPS	Realisasi	Selisih	efisiensi
60.307.577.137,00	57.624.587.899,00	2.682.989.238,00	4,45%

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM MASA PENDEMI COVID-19

Sudah lebih dari sembilan bulan sejak Maret hingga Desember 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19.



Sepanjang semester I tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan menangani pandemi Covid-19 dengan titik berat pada sektor kesehatan. Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain, menerbitkan berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan-penggunaan masker-jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes Covid-19, menjalankan tes Covid-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru.

Melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada semester I-2020, pemerintah terus melakukan upaya menghentikan laju kenaikan kasus pada semester II-2020 dengan memperluas cakupan strategi, yakni memasukkan penanganan dampak Covid-19 di bidang ekonomi. Di bidang kesehatan, pemerintah terus mengampanyekan perilaku 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun

Pada 20 Juli 2020, pemerintah, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas jangkauan dan tugas yang selama ini diemban oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19). Di dalam komite tersebut, terdapat Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (STPC-19), serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan perpres tersebut, nama Gugus Tugas Covid-19 diubah menjadi STPC-19 dengan fungsi dan struktur yang sama.

Dengan perluasan strategi kebijakan tersebut, upaya mengatasi Covid-19 di bidang kesehatan tetap terus dijalankan. Upaya ini sejalan dengan dua tujuan umum penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh WHO, yakni menurunkan penyebaran Covid-19 dan mengurangi kematian karena Covid-19. Berbagai kegiatan untuk menurunkan penyebaran virus dapat dirangkum dalam lima kata kunci, yakni temukan, tes, isolasi kasus, karantina kontak, dan pembatasan sosial. Sedangkan, kegiatan untuk mengurangi kematian ditempuh dengan memperluas layanan kesehatan, menambah sarana kesehatan penting/vital, serta memperkuat tenaga medis.



Dalam rangka upaya mencegah, meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan agar sistem pemerintahan daerah tetap berjalan maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Aparatus Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mengatur tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home=WFH*), dengan jadwal diatur disesuaikan dengan kondisi covid di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk satuan kerja bidang kesehatan dalam hal ini tenaga pelayanan kesehatan di rumah sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan tetap melaksanakan tugas di kantor agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar.
3. Melakukan pembatasan kegiatan kegiatan/rapat yang mengumpulkan orang.
4. Melakukan penundaan kegiatan dinas luar kota dan/atau luar negeri.
5. Melakukan pembatasan pertemuan dengan tamu dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kunjungan dari luar daerah dan/atau luar negeri kecuali terkait dengan koordinasi pencegahan Covid-19 atau atas seijin Bupati.



Gambar. 3.23. Pelaksanaan rapat dalam masa Pandemi Covid-19

6. Menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor antara lain memakai masker atau penutup mulut/hidung, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak minimal 2 meter dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk mencegah penularan Covid-19.
7. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dinas secara *online/daring* .



Strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penanganan Covid-19, pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 60% pada semua perangkat daerah.
2. Penjadwalan ulang program dan kegiatan tahun anggaran 2020.
3. Melaksanakan refocusing anggaran Covid-19. Adapun rincian anggaran refocusing Covid-19 sebagai berikut :

Tabel 3.50. Komposisi refocusing dalam rangka Covid-19 tahun 2020

	PAGU	PAGU setelah Refocusing	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	3.743.918.763.744	3.524.641.967.185	917.584.788.282	26,12
PENDAPATAN DAERAH	3.568.568.763.744	3.349.291.967.185	1.317.215.129.007	39,33

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas, 2020

Dalam rangka menangani pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan sarana prasarana untuk kasus Covid-19, antara lain :

1. Rumah Sakit KERJASAMA Lini 1 : 2 RS (RSUD Margono Sukarjo DAN RSUD Banyumas)
2. Rumah Sakit KERJASAMA LINI 2 : RST WIJAYAKUSUMA
3. Rumah Sakit KERJASAMA LINI 3 : RSUD AJIBARANG, RS ANANDA, RS WIRADADI, RS ELISABETH, RS HERMINA, RS DADI KELUARGA, RS SIAGA MEDIKA. KESIAPAN RUANG ISOLASI
4. RUMAH KARANTINA : DIKLAT BATURRADEN (80 TT)
5. Ambulance RS Rujukan dan PCS : 27 Unit

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk Covid-19 yaitu :

1. Dokter : 529
2. Perawat : 1.469
3. Bidan : 282
4. Tenaga Kesehatan Lainnya : 2.286





Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Deteksi dini dan respon wilayah
 - a. Screening menggunakan formulir deteksi dini untuk faskes sesuai pedoman
 - b. Melakukan Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan Kontak Erat Positif
 - c. Pendirian Posko Covid-19 di Seluruh Puskesmas Gratis Untuk Mempermudah Akses Informasi Bagi Masyarakat
 - d. Pendirian Posko Perbatasan di 4 Pintu Masuk Wilayah Banyumas
 - e. Surat Edaran Bupati bagi seluruh Perangkat Daerah dan Seluruh Institusi berisi Upaya Pencegahan untuk memutus mata rantai penularan sesuai Protokol dari pemerintah
 - f. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
 - g. Pencatatan dan Pelaporan Kasus, Mempemudah Akses Informasi bagi masyarakat
<http://covid19.banyumaskab.go.id/>
 - h. Menetapkan Fasilitas Karantina Khusus di Baturaden
2. Perbaikan manajemen klinis
 - a. Penunjukan Rumah Sakit Lini 3 dan melakukan MOU untuk penanganan pasien PDP dan Konfirmasi Covid-19
 - b. Penambahan Kapasitas Ruang Isolasi bagi Rumah Sakit Rujukan Lini 1 dan Lini 2
 - c. Pengadaan APD, Rapid Test dan Logistik lain untuk manajemen klinis kasus covid-19 dengan menggunakan dana BTT
3. Komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat





- a. Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Desa, Tingkat RW dan RT
- b. Media Promosi Kesehatan Melalui Siaran TV dan Radio, Poster dan Media Sosial
- c. Informasi Terkait Covid-19 disediakan secara cepat, transparan dan mudah diakses
- d. Koordinasi Forkompimda dengan Lintas Organisasi Profesi (IDI, PPNI, Ormas, Pemuka Agama, FKUB) dan LSM
- e. Pak Bupati sebagai Juru Bicara Covid-19
- f. Mengatasi ketidakpastian, persepsi, dan manajemen informasi yang salah/hoaks.

Untuk kegiatan preventif yang dilakukan yaitu Jaring Pengaman Sosial. Jaring Pengaman Sosial yang dilaksanakan yaitu :

1. Untuk Masyarakat Yang Terdampak Langsung Covid-19 yang dilaksanakan yaitu pemberian bantuan Sembako kepada OPD senilai Rp. 100.000,- per rumah tangga per 14 (empatbelas) hari untuk waktu 3 (dua) bulan.
2. Pelaksanaan pasar murah oleh Dinperidag dengan realisasi 2.000 paket sembako.
3. Supervisi ASN untuk pengawasan Gugus Tugas Desa/Kelurahan & RT.



Gambar 3.24 pembagian masker kepada masyarakat oleh Bupati Banyumas



Gambar 3.25 Penyemprotan desinfektan di jalan-jalan protokol

4. Peran aktif setiap orang dalam Penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Banyumas, dengan **wajib** selalu menggunakan masker/tutup mulut dan hidung baik di dalam ruangan/rumah/kantor/Gedung maupun di luar ruangan/rumah/kantor/gedung
5. Menyiapkan RS Geriatri Sebagai Pusat RS Corona.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB IV PENUTUP

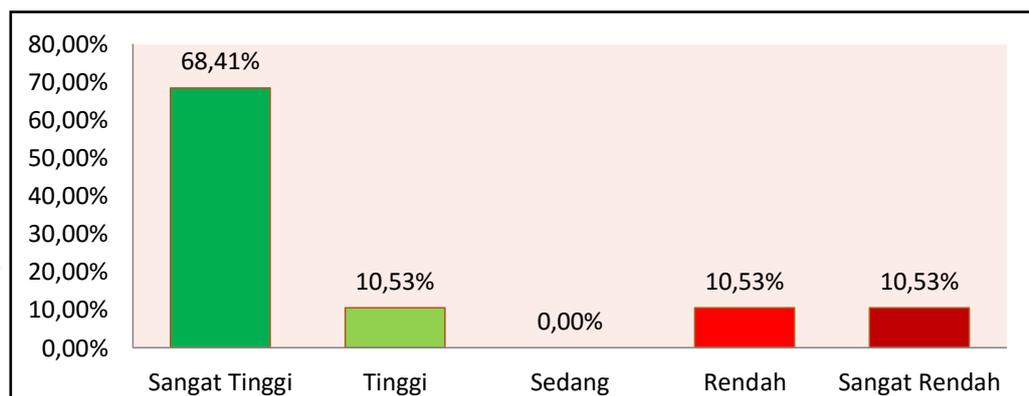
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) Misi, 9 (sembilan) Tujuan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai **134,10%** atau kategori "**Sangat Baik**". Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 19 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan :

- 13 indikator (68,41%) tercapai dengan dikategorikan "Sangat Tinggi"
- 2 Indikator Kinerja Utama (10,53%) tercapai dengan kategori "Tinggi"
- 2 Indikator Kinerja Utama (10,53%) tercapai dengan kategori "Rendah"
- 2 Indikator Kinerja Utama (10,53%) tercapai dengan kategori "Sangat rendah".

Dibawah ini **grafik** perbandingan capaian kinerja IKU pada tahun 2020.

Grafik 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020



Pencapaian target kinerja dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama tahun 2020 dialokasikan anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Utama sebesar Rp.1.273.294.764.390,- dan terealisasi Rp. 1.091.642.168.980,- atau 85,73% .



Dari 19 (Sembilan belas) indikator kinerja utama, 4 (empat) indikator kinerja utama dengan predikat rendah dan sangat rendah dipengaruhi oleh kondisi tahun 2020 dimana pandemi covid-19 memberikan pengaruh terhadap perekonomian, sektor tenaga kerja dan pariwisata karena banyak pemutusan hubungan kerja sehingga meningkatkan pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat juga. Sektor pariwisata juga mengalami dampak dengan menurun drastis kunjungan ke obyek-obyek wisata. Untuk meningkatkan capaian indikator tersebut antara lain :

1. Penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, pengembangan pusat pertumbuhan, pengembangan sektor pertanian yang memiliki peranan paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, pengembangan agribisnis dengan basis padat karya .
2. Peningkatan anggaran pembangunan untuk pembiayaan perbaikan dan pengembangan infrastruktur maupun kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Pembebasan pajak hotel dan restoran, pengurangan biaya/tarif masuk ke lokasi pariwisata, memasarkan destinasi wisata di Kabupaten Banyumas baik melalui media cetak dan online, meningkatkan paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalannya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya.
4. Meningkatkan potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage sehingga mendorong perkembangan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Banyumas dan mengembangkan produk wisata non fisik sebagai pendukung, antara lain meliputi kerajinan, kuliner, dan produk-produk kreatif lainnya.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang sesuai dengan kemampuan kebanyakan masyarakat tersebut ditambah dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu diberikan modal yang akan digunakan untuk menunjang usaha tersebut. Juga meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan memberikan penyuluhan dan bimbingan sebagai motivasi para pencari kerja untuk membuka dan memperluas lapangan kerja sendiri sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.

6. Memperluas kesempatan kerja dengan cara memanfaatkan usaha-usaha yang mampu menampung pekerja yang banyak dan mempermudah ijin usaha, terutama UMKM yang dimana saat ini masih sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat.
7. Melaksanakan pameran kesempatan kerja (Job Fair).

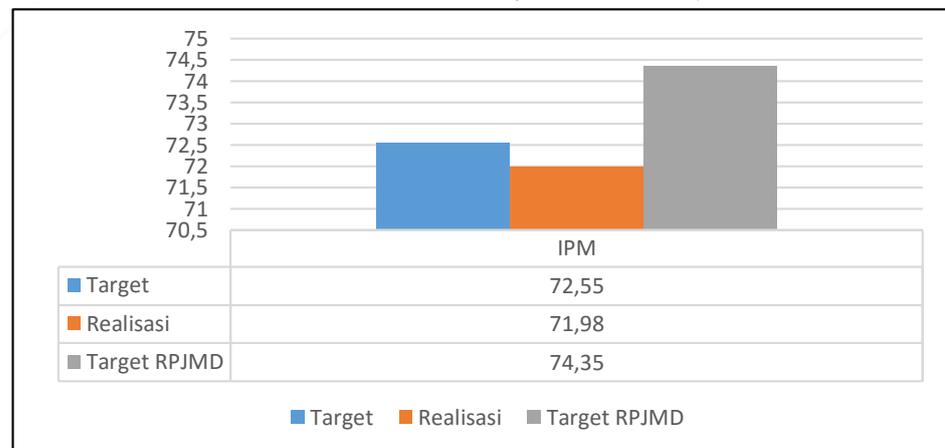
B. Progress penyelesaian isu-isu strategis

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, dengan 2 tujuan yaitu :

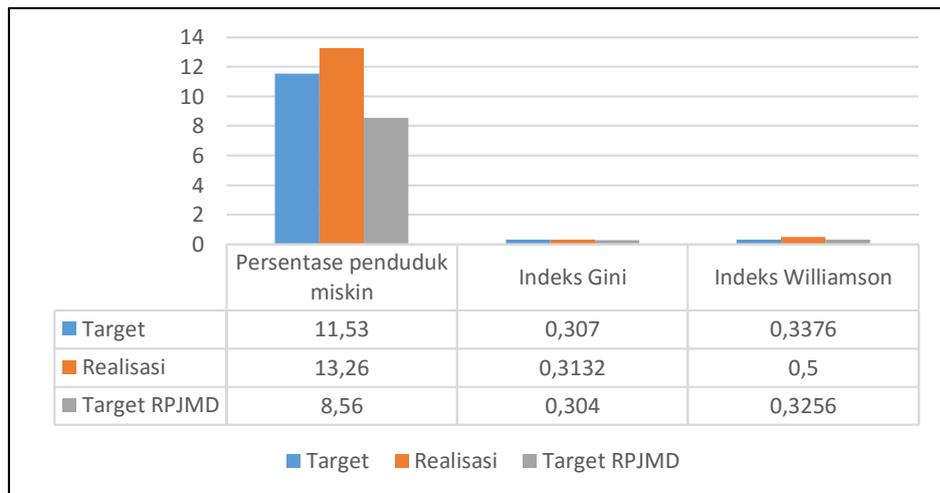
- a. Tujuan ke-2, Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan target 72,55 terealisasi 71,98 sedangkan target akhir RPJMD adalah 74,35; dan
- b. Tujuan ke-3, Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dengan 3 Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk Miskin dengan target 11,53% realisasi 13,26% dan tujuan akhir RPJMD 8,56, Indeks Gini dengan target 0,307 realisasi 0,3132 dengan target akhir RPJMD 0,304, Indeks Capaian Williamson dengan target 0,3376 realisasi 0,5, dengan target akhir 0,2356 dan PDRB perkapita dengan target 33,000 realisasi 31,87 dengan target akhir RPJMD 38.655, sehingga rata-rata capaian tujuan ke-2 adalah 82,86% .

Grafik 4.2 Kualitas Sumber Daya manusia tujuan ke-2





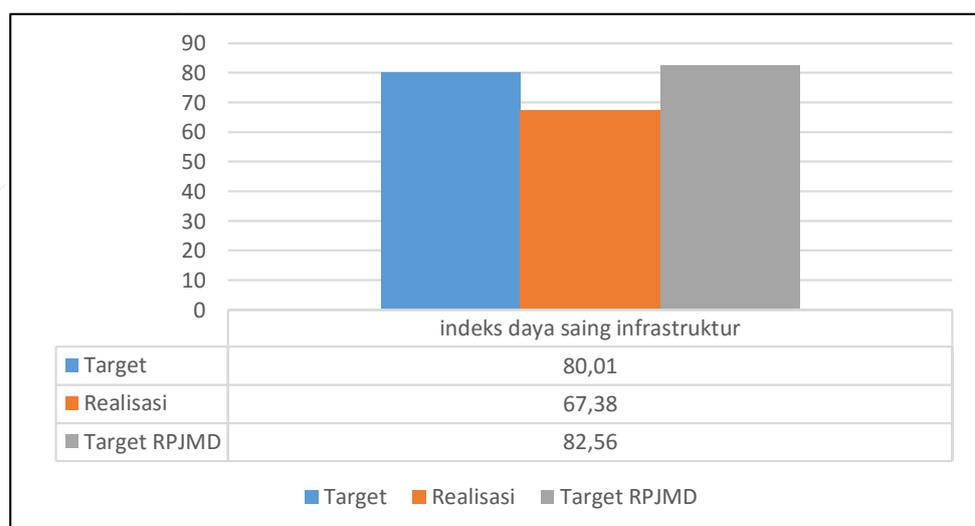
Grafik 4.3 Kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan ke-3



2. Ketersediaan Infrastruktur

Permasalahan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan, dengan tujuan ke-7 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan didukung oleh Indikator Kinerja Utama Indeks Daya saing infrastuktur dengan target 80,01 realisasi 67,38 dan target akhir RPJMD 82,56. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

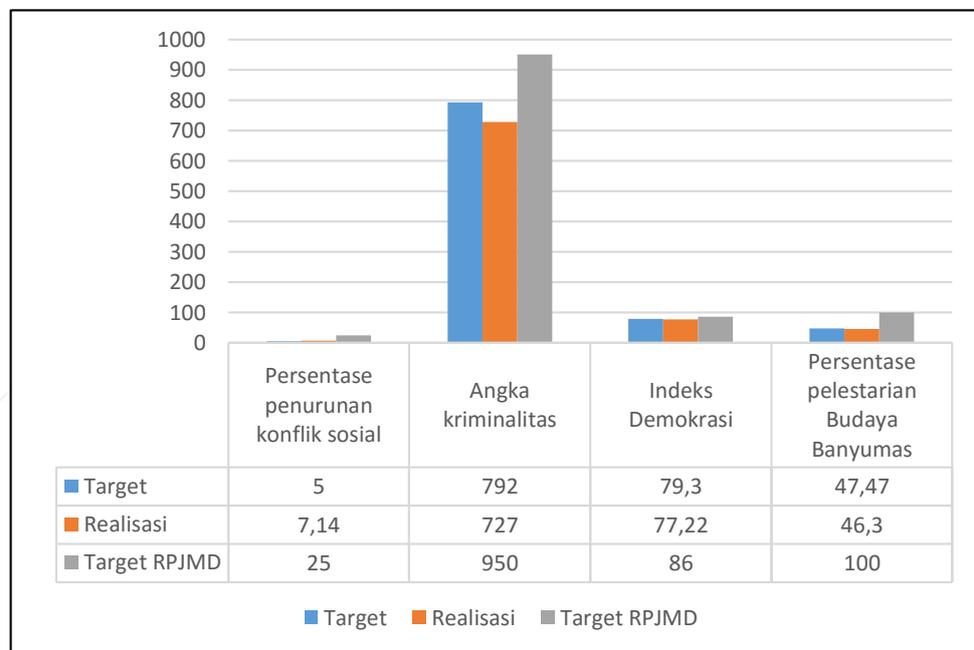
Grafik 4.4 Ketersediaan infrastruktur



3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Permasalahan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan pendapat masyarakat di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-8 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius, dengan tujuan ke-8: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, didukung dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase penurunan konflik sosial dengan target 5% realisasi 7,14 dengan target akhir RPJMD 25%, Angka kriminalitas dengan target 792 kasus realisasi 727 kasus dengan target akhir RPJMD 950, Indeks Demokrasi dengan target 79,3 realisasi 77,22 dengan target akhir RPJMD 86 dan persentase pelestarian budaya Banyumas dengan target 47,47% realisasi 46,3% dengan target akhir RPJMD 100%. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.5 Pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

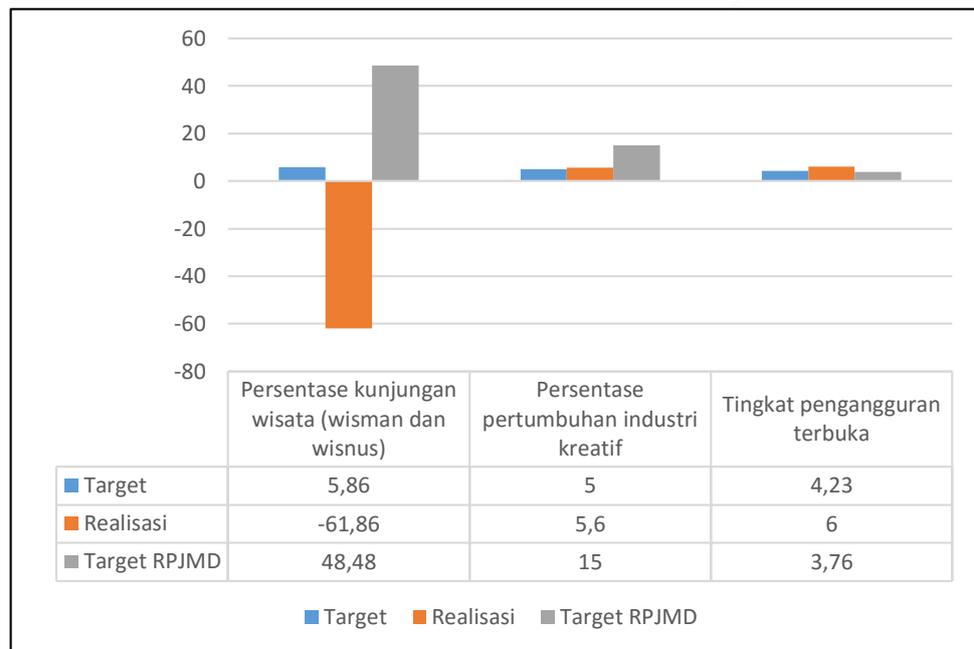


4. Kemiskinan dan Pengangguran

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah

(RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal., dengan tujuan ke-8 yaitu : Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Indikator Kinerja Utama sebanyak 3 IKU, yaitu Persentase Kunjungan wisata (Wisman dan wisnus) dengan target 5,86 realisasi -61,85 dan target akhir RPJMD 48,48%, Persentase pertumbuhan industri kreatif dengan target 5 realisasi 5,56 dan target akhir RPJMD 15, Tingkat pengangguran terbuka dengan target 4,23 realisasi 6 dan target akhir RPJMD 3,76. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.6 Kemiskinan dan Pengangguran

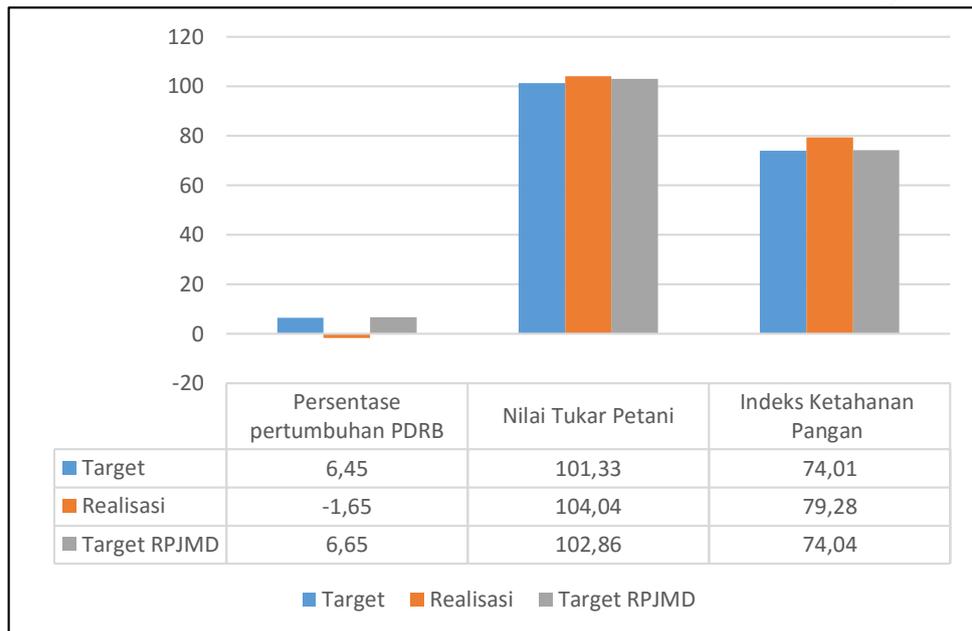


5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Permasalahan pertanian mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan 2 misi, yaitu Misi ke-3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dengan tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pertumbuhan PDRB dengan target 6,45 realisasi -1,65 dengan target akhir

RPJMD 6,65 , sedangkan indikator lainnya yaitu Nilai Tukar Petani dengan target 101,33 dengan realisasi 104,04 target akhir RPJMD 102,86. Misi yang lainnya yaitu misi ke-4: Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan dengan tujuan Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Pangan dengan target 74,01 realisasi 79,27 dengan target akhir RPJMD 74,04. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.7 Pertanian mendukung kedaulatan pangan

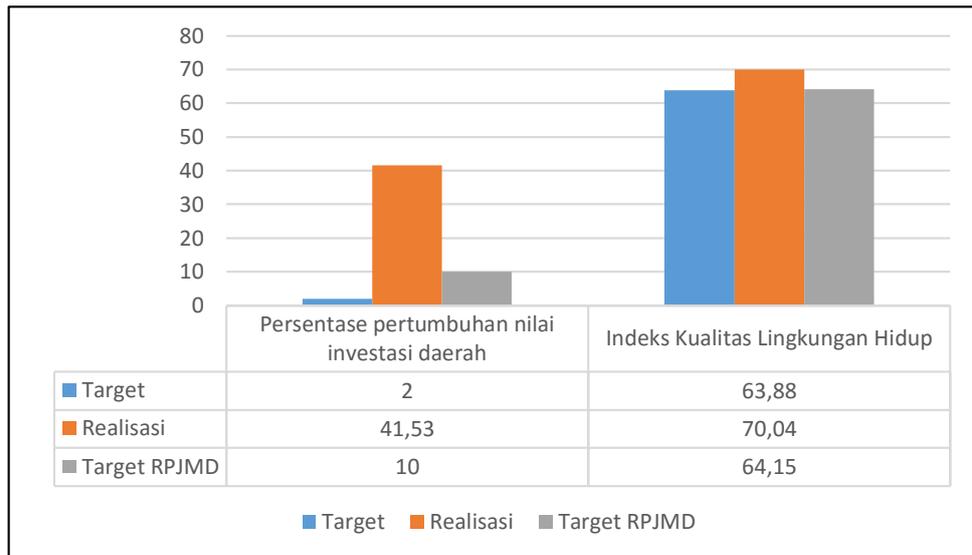


6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-5 : Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan, dengan tujuan: Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah dengan target 2 realisasi 41,53 target akhir RPJMD 10 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 63,88 realisasi 70,04 dan target akhir RPJMD 64,15. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.



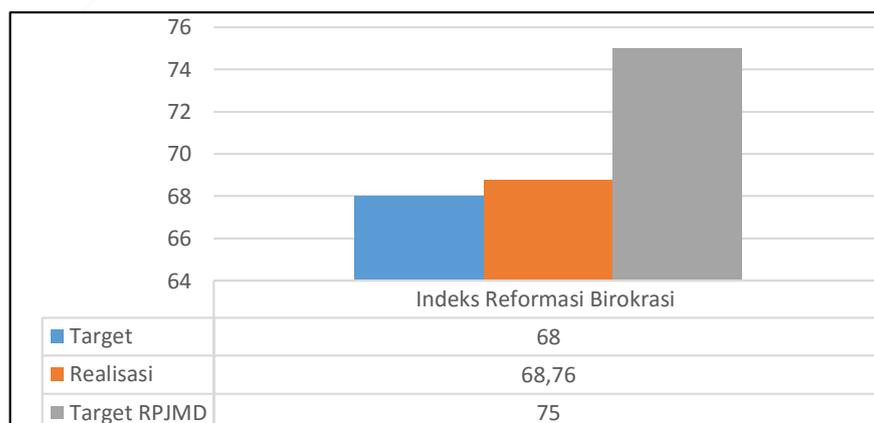
Grafik 4.8 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup



7. Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-1 : Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat dengan tujuan: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 68, realisasi 68,76 dan target akhir RPJMD 75. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.9 Tata kelola pemerintahan





LAMPIRAN



DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
1.	Peringkat 2 nasional Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Terbaik tahun 2020	KPK	Pemkab Banyumas
2.	Penghargaan <i>Innovative Government Award</i> (IGA) tahun 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas	Kemendagri	Pemkab Banyumas
3.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (9 kali berturut-turut)	BPK RI	Pemkab Banyumas
4.	Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk RSUD Ajibarang	Kemenpan RB	RSUD Ajibarang
5.	Penghargaan Terbaik I Kabupaten Sektor Pasar Tradisional Lomba Inovasi Daerah Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid 19 Kemendagri	Kemendagri	Dinperindag
6.	Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan HAM	Pemkab Banyumas
7.	Nominasi penghargaan Nirwasinta Tantra untuk dokumen IKPLHD .	KLHK	DLH
8.	Penghargaan pengurangan resiko bencana di Kabupaten Banyumas	BNPB Nasional	Pemkab Banyumas BPBD
9.	Akreditasi A untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Perpustakaan Nasional RI	Dinarpusda
10.	Natamukti Award 2020 kepada Kabupaten Banyumas	International Council for Small Business Indonesia.	Dinperindag



No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
11.	Government Ci EI Awards 2020 kepada Kabupaten Banyumas Gold Winner of Indonesia Trade Award 2020		Dinperindag
12.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award peringkat 7 Propinsi Jawa Tengah	Propinsi Jawa Tengah	Dinkominfo
13.	Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Jawa Tengah sebagai Kabupaten Terbaik ke III Tahun 2020	Propinsi Jawa Tengah	Bappedalitbang
14.	Stan terbaik II Pameran kearsipan virtual Jawa Tengah	Dinarpusda Propinsi Jawa Tengah	Dinarpusda
15.	Juara 1 Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Perintis Lingkungan.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
16.	Sertifikat apresiasi partisipasi Proklamasi dengan kategori Utama untuk Desa Sambeng Wetan Kec. Kembaran dan Kelurahan Mersi Kec. Purwokerto Timur.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
17.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMPN 4 Banyumas.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
18.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMPN 1 Kembaran.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
19.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMPN 2 Kemranjen.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
20.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMPN 1 Lumbir.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
21.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMPN 1 Purwojati.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
22.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMPN 5 Purwokerto.	Propinsi Jawa Tengah	DLH



No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
23.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMPN 2 Sumpiuh.	Propinsi Jawa Tengah	DLH
24.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk SMP Muhammadiyah Jatilawang.	Propinsi Jawa Tengah	DLH



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN
Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwokerto, Januari 2020
BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target
1	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemenpan dan RB.	Indeks	68,00
2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3))$ dimana : X(1) : Indeks Harapan Hidup X(2) : Indeks Pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah). X(3) : Indeks Standar Hidup Layak	Indeks	72,55
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1. Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	11,53
		2. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$ Dimana : P _i : Persentase rumah tangga Penduduk pada kelas ke-i Q _i : Persentase kumulatif total Pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i. Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 : Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 : Ketimpangan sedang G > 0,5 : Ketimpangan tinggi	Indeks	0,307
		3. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$ dimana : Y _i : PDRB perkapita di kecamatan I Y : PDRB perkapita rata-rata kab/Kota. F _i : jumlah penduduk di kecamatan i n : jumlah penduduk di kab/kota.	Indeks	0,3376
		4. PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	Juta Rp.	33,00
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian.	1. Persentase pertumbuhan PDRB.	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$ dimana : t+1 : tahun pengamatan PDRB t : tahun pengamatan PDRB sebelumnya.	%	6,45
		2. Nilai Tukar Petani (NTP)	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Indeks	101,33

5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan	$Y(j) = \sum_{n-1}^9 a_{ixij}$ <p>Keterangan : Y_j = Indeks ketahanan pangan ke-j a_i = Bobot masing-masing indikator X_{ij} = Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten</p>	Indeks	74,01
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja.	1. Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	$\frac{\text{Nilai investasi daerah (t+1)} - \text{Nilai investasi daerah (t)}}{\text{Nilai investasi daerah (t)}} \times 100\%$ <p>Dimana : t+1 : tahun ini t : tahun sebelumnya</p>	%	2
		2. Indeks kualitas lingkungan hidup	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTLH)$ <p>Dimana : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTLH = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	Indeks	63,88
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Rata-rata dari prosentase jalan kondisi baik + prosentase akses air minum layak + prosentase kawasan tidak kumuh perkotaan + prosentase akses air limbah + prosentase rumah ytanggal yang memiliki rumah + prosentase ketersediaan terminal	Indeks	80,01
8	Menumbuhkan dan mengembangk an daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	1. Persentase pertumbuhan kunjungan wisata (wisman dan wisnus)	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisata(t+1)} - \text{Jumlah kunjungan wisata(t)}}{\text{Jumlah kunjungan wisata(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana : t+1 : tahun ini t : tahun sebelumnya</p>	%	5,86
		2. Persentase pertumbuhan industri kreatif	$\frac{\text{Jumlah industri Kreatif (t+1)} - \text{jumlah industri kreatif (t)}}{\text{Jumlah industri kreatif (t)}} \times 100\%$ <p>Dimana : t+1 : tahun ini t : tahun sebelumnya</p>	%	5
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	%	4,23

9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.	1. Persentase penurunan konflik sosial.	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial}(t+1) - \text{Jumlah konflik sosial}(t)}{\text{Jumlah konflik sosial}(t)} \times 100\%$	%	5
		2. Angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk.	kasus	792
		3. Indeks Demokrasi	Nilai indeks demokrasi	indeks	79,30
		4. Persentase pelestarian budaya banyumas	$\frac{\text{Jumlah budaya Banyumas yang dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya yang ada}} \times 100\%$	%	47,47

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penataan jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN	Rp. 890.246.760
2.	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN	Rp. 2.428.788.900
3.	Program Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 4.197.215.000
4.	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	Rp. 217.750.000
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp. 3.211.200.000
6.	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial	Rp. 824.927.800
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan	Rp. 150.000.000
8.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 45.374.982.100
9.	Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa	Rp. 537.500.000
10.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah	Rp. 97.500.000
11.	Program Informasi dan Layanan Hukum	Rp. 1.075.000.000
12.	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 425.000.000
13.	Program Perumusan Kebijakan dan pembinaan Bidang perekonomian	Rp. 518.750.000
14.	Program Pembinaan keagamaan	Rp. 2.884.998.000
15.	Program layanan Pimpinan dan Kehumasan	Rp. 900.000.000
16.	Program penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 350.000.000
17.	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Rp. 550.000.000
18.	Program peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Rp. 1.350.000.000

19.	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Rp.	1.150.000.000
20.	Program Peningkatan Pelayanan kehumasan	Rp.	875.000.000
21.	Program Pelayanan Keprotokolan	Rp.	225.000.000
22.	Program Peningkatan Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.	435.000.000
23.	Program peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTP	Rp.	2.286.476.850
24.	Program Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTP	Rp.	1.182.079.250
25.	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	1.583.459.150
26.	Program penyelenggaraan Pembinaan pemerintahan Desa	Rp.	100.000.000
27.	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Rp.	2.025.000.000
28.	Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Rp.	11.493.800.000
29.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dan Sekretariat	Rp.	5.313.200.000
30.	Program Kesra	Rp.	1.150.000.000
31.	Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum	Rp.	9.572.600.000
32.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	100.000.000
33.	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	Rp.	518.750.000
34.	Program Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	442.500.000
35.	Program Pembinaan Keagamaan	Rp.	2.884.998.000
36.	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	10.443.399.500
37.	Program peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah	Rp.	28.115.000.000
38.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Rp.	8.390.859.250
39.	Program Peningkatan Kualitas Dokumen penganggaran	Rp.	964.702.000
40.	Program Peningkatan Keamanan Informasi	Rp.	348.500.000
41.	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media	Rp.	200.000.000
42.	Massa	Rp.	2.812.500.000
43.	Program peningkatan pelayanan Informasi Publik	Rp.	6.596.500.000
44.	Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Rp.	75.000.000
45.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp.	1.400.000.000
46.	Program pengembangan E Government	Rp.	900.000.000
47.	Program Pengelolaan Informasi Adminduk	Rp.	147.500.000
48.	Program peningkatan penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non perizinan	Rp.	188.500.000
49.	Program Promoso dan Kerjasama Investasi	Rp.	345.000.000
			165.000.000

50.	Program penataan Administrasi pencatatan Sipil	Rp.	7.698.836.000
51.	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Rp.	147.500.000
52.	Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan.	Rp.	75.000.000
53.	Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan perizinan	Rp.	9.425.514.000
54.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
55.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat	Rp.	142.532.730.588
		Rp.	4.471.109.840
56.	Program wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	Rp.	38.650.000.000
57.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
58.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	59.372.299.000
59.			
60.	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat	Rp.	2.241.250.000
61.			
62.	Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan	Rp.	640.000.000
63.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Rp.	165.714.509.000
64.	Program pelayanan Kesehatan	Rp.	6.501.993.000
65.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Rp.	40.158.386.000
66.	Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp.	350.000.000
67.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rp.	185.000.000.000
68.	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp.	200.000.000
69.	Program manajemen dan Kebijakan Kesehatan	Rp.	23.689.561.000
70.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Rp.	5.064.318.000
		Rp.	26.012.848.000
71.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	15.392.547.000
72.	Program Upaya Kesehatan masyarakat	Rp.	337.500.000
73.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp.	4.312.130.000
74.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	187.500.000
75.	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	Rp.	1.156.250.000
76.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil	Rp.	100.000.000
77.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Rp.	2.886.250.000
78.	Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.207.500.000

79.	Program pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial	Rp.	181.250.000
80.	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	Rp.	590.000.000
81.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	150.000.000
82.	Program peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan pemenuhan Hak anak	Rp.	180.644.000
83.	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa	Rp.	625.000.000
84.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp.	1.212.500.000
85.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp.	200.000.000
86.	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.	417.500.000
87.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Rp.	7.768.118.000
88.	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Rp.	977.102.000
89.	Program Pelayanan keluarga Berencana Penataan Struktur Industri	Rp.	485.000.000
90.	Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian	Rp.	470.000.000
91.	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	Rp.	86.400.000
92.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	Rp.	440.000.000
93.	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	Rp.	460.000.000
94.	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	Rp.	7.661.383.000
95.	Program Peningkatan Wilayah Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Rp.	560.000.000
96.	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan luar Negeri	Rp. Rp.	381.000.000 100.000.000
97.	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	Rp.	200.000.000
98.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp.	640.000.000
99.	Program optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan	Rp.	1.225.000.000
100.	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rp.	123.750.000
101.	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Rp.	300.000.000
102.	Program Perlindungan Tanaman	Rp.	400.000.000
103.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pertanian	Rp.	90.000.000
104.	Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT	Rp.	6.595.000.000
105.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp.	300.000.000
106.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Rp.	2.016.580.000
107.	Program Penyediaan Benih Pertanian	Rp.	286.000.000
108.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp.	200.000.000

109.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Rp.	260.000.000
110.	Program Penyediaan Daging Ternak ASUH	Rp.	994.982.000
111.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp.	75.000.000
112.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.	1.263.553.000
113.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Rp.	350.000.000
114.	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	Rp.	595.000.000
115.	Program Penyediaan Benih Ikan Air tawar	Rp.	595.000.000
116.	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	Rp.	200.000.000
117.	Program Penguatan Cadangan Pangan	Rp.	777.013.250
118.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.	877.880.000
119.	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas	Rp.	941.840.900
120.	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh	Rp.	7.201.112.000
121.	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wangon	Rp.	564.800.000
122.	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto	Rp.	10.894.137.000
123.	Program peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	1.616.850.000
124.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	600.000.000
125.	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA/TPST	Rp.	321.476.277
126.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Rp.	875.727.500
127.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp.	1.078.965.000
128.	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan wilayah Kembaran	Rp.	287.500.000
129.	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan wilayah Ajibarang	Rp.	531.195.000
130.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	5.876.000.000
131.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp.	1.620.000.000
132.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	22.750.000.000
133.	Program pengembangan pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Rp.	3.233.000.000
134.	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	Rp.	1.235.000.000
135.	Program Peningkatan Perencanaan Teknis	Rp.	600.000.000
136.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	1.100.000.000
137.	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	Rp.	28.384.776.000

138.	Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan/jembatan	Rp.	16.230.000.000
139.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp.	2.990.000.000
140.	Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	Rp.	8.632.825.000
141.	Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan	Rp.	36.908.600.000
142.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Rp.	500.000.000
143.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rp.	2.200.000.000
144.	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	Rp.	1.095.000.000
145.	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Rp.	2.582.000.000
146.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase	Rp.	6.175.000.000
147.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp.	8.452.225.000
148.	Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp.	1.100.000.000
149.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	138.651.557.150
150.	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp.	2.535.000.000
151.	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Rp.	675.000.000
152.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp.	100.000.000
153.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	11.484.620.000
154.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp.	36.629.896.000
155.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp.	6.240.870.000
156.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.	1.100.000.000
157.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.	730.074.669
158.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	1.032.500.000
159.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif	Rp.	595.500.000
160.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp.	146.330.000
161.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	420.000.000
162.	Program Pengembangan Sistem Inovasi Kreativitas dan Litbang	Rp.	500.000.000
163.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp.	110.000.000
164.	Program Kajian Strategis Daerah	Rp.	1.427.500.000
165.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp.	327.500.000
166.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	97.500.000
167.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	161.025.000

168.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	147.500.000
169.	Program Perlindungan dan pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Rp.	120.000.000
170.	Program Pengembangan dan penempatan Transmigrasi	Rp.	425.000.000
171.	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Rp.	75.000.000
172.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Rp.	1.200.000.000
173.	Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga	Rp.	1.815.000.000
174.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp.	810.000.000
175.	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp.	2.235.050.000
176.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp.	976.460.000
177.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	460.100.000
178.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp.	1.976.028.000
179.	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum	Rp.	1.206.250.000
180.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp.	708.500.000
181.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Rp.	180.000.000
182.	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rp.	65.000.000
183.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp.	1.405.000.000
184.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp.	1.705.000.000
185.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp.	206.250.000
186.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	56.250.000
187.	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp.	601.250.000
188.	Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp.	2.250.000.000



